

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MENGATASI ANAK PUTUS
SEKOLAH(STUDI PADA KOTA SELATPANJANG, KECAMATAN
TEBING TINGGI, KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

MARIANA

NPM: 187310324

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : MARIANA
NPM : 187310324
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (studi Pada Kota Selat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub bab dalam Skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Turut Menyetujui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Ranggi Ade Nabhan, S.H., M.Si

Pembimbing

Dr. Dra.Hj.Monalisa ,M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Mariana
NPM : 187310324
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul skripsi : Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak
Putus Sekolah (studi Pada Kota Selat Panjang,
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan –ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Ketua



Dr. Dra. Hj. Monalisa, M.Si

Sekretari

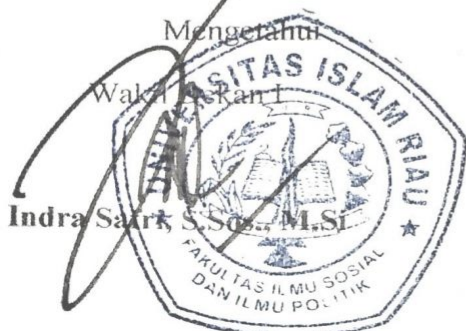


Andriyus, S. Sos., M.Si

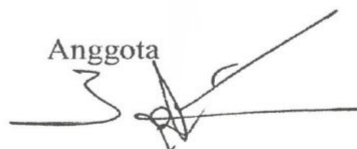
Mengetahui

Wakil Dekan I

Indra Satrio S. Sos., M.Si



Anggota



Irwan Gesmi, S.Sos. M.Si

Scanned by TapScanner

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 649 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 051/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Mariana
N P M : 187310324
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S I)

Judul Skripsi : **PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH(STUDI PADA KOTA SELATPANJANG, KECAMATAN TEBING TINGGI, KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI).**

Struktur Tim :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Hj. Monalisa, M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Andriyus, S.Sos., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 4. | Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 06 Juli 2022
Dekan,

Dr.
NF

Scanned by TapScanner

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 649 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 06 Juli 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 07 Juli 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Mariana
 NPM : 187310324
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : **PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH(STUDI PADA KOTA SELATPANJANG, KECAMATAN TEBING TINGGI, KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI).**
 Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "
 Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Monalisa, M.Si.	Ketua	1.
2.	Andriyus, S.Sos.,M.Si	Sekretaris	2.
3.	Irwan Gesmi, S.Sos.,M.Si	Anggota	3.
4.		Notulen	4.

Pekanbaru, 07 Juli 2022



Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bidang Akademi

Scanned by TapScanner

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mariana

NPM : 187310324

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Judul Skripsi : Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah
(Studi Pada Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Kepulauan Meranti)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Ketua

Dra. Hj. Monalisa, M.Si

Sekretaris

Andriyus, S. Sos., M.Si

Anggota

Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si

Turut Mengetahui

Wakil Dekan

Indra Satri, S.Sos., M.Si

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa atas berkat dan rahmatnyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah(Studi Pada Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti)”

Adapun tujuan Skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada universitas islam riau dan untuk memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan, meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi penelitian ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa Skripsi penelitian ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL Sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M. Si selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas sarana dan pra sarana untuk menimba ilmu di tempat yang bapak pimpin.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, mengajarkan, dan memfasilitasi sarana dan pra sarana untuk menimba ilmu di tempat yang bapak pimpin.

4. Ibu Dr. Dra.Hj.Monalisa,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dan meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan yang sangat berguna dimasa yang akan datang serta memberikan banyak arahan kepada penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.

5. Bapak/ibu dosen khususnya dosen ilmu pemerintahan yang telah banyak memberikan nasihat dan ilmu pengetahuan selama masa studi.

6. Seluruh Staf, karyawan/ti Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Perpustakaan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan usulan penelitian

7. Teristimewa penulis ucapkan untuk Orangtua kepada Ayahhanda Sanimin dan Ibunda Samini yang telah melimpahkan kasih sayang, dukungan moril maupun materil serta doa yang diberikan kepada penulis.

8. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid Dinas Pendidikan beserta staff yang telah bersedia memberikan data kepada penulis.

9. Terimakasih kepada Ardiansya Putra(Tayo),yang telah memberi dukungan dan menyemangati penulis sehingga bisa menyelesaikan naskah skripsi ini.

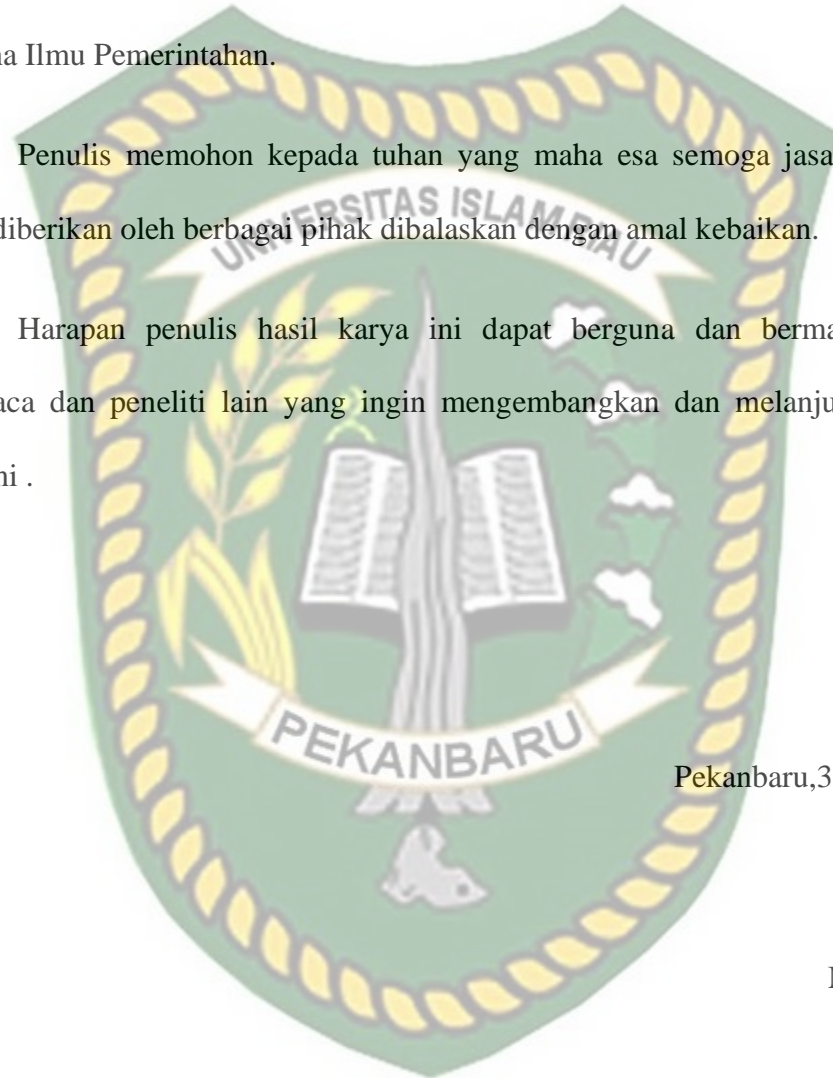
10. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Kelas I angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih selama ini telah menemani penulis dari awal masa kuliah dan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.

Penulis memohon kepada tuhan yang maha esa semoga jasa baik yang telah diberikan oleh berbagai pihak dibalaskan dengan amal kebaikan.

Harapan penulis hasil karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan peneliti lain yang ingin mengembangkan dan melanjutkan karya tulis ini .

Pekanbaru,30 Mei 2022

MARIANA





DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	13
2. Konsep Pemerintah Daerah	15
3. Konsep peran.....	17
4. Konsep Kebijakan	24

5. Konsep Kebijakan Publik.....	25
6. Konsep Implementasi Kebijakan	26
7. Konsep Pendidikan	28
8. Konsep Anak Putus Sekolah	32
B.Penelitian Terdahulu.....	38
C.Kerangka Pikir.....	45
D.Konsep Operasional.....	46
E.Operasional Variable	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Informan Dan Key Informan.....	48
D. Teknik Penetapan Informan	50
E. Jenis Sumber Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	52
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	52
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A.Gambaran Umum Kota Pekanbaru	54
1. Sejarah singkat Kota Selatpanjang.....	54
2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru	57
3. Pemerintahan Kota Selatpanjang	59
B.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Selatpanjang,Kecamata Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti.....	64

1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti	64
2. Tugas Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti	66
3. Struktur Oeganisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti	67
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	75
1.1.1. Usia Informan	77
1.1.2. Jenis Kelamin	78
1.1.3. Tingkat Pendidikan	79
B. Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Studi Pada Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti).....	80
1. Peranan Norma-Norma	81
2. Peranan Individu	88
3. Struktur Sosial.....	94
C. Hambatan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah(Studi Pada Kota Selapanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaen Kepulauan Meranti).....	97
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	99
6.2. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

I.1. Anak Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	6
I.2. Data	6
II.1. Penelitian Terdahulu.....	38
II.2. Operasional Variable.....	46
III.1. Waktu Penelitian	55
IV.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021	58
IV.2. Nama Kecamatan Beserta Nama Ketentuan Yana Ada di Kota Selatpanjang	61
V.1. Identitas Informan Penelitian Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Sekolah (Studi Pada Kota, Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab, Kab Meranti	76
V.2. Identitas Informan Berdasarkan Tentang Kriteria Usia	77
V.3. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	79
V.4. Identitas Informan Berdasarkan Tingkatan Pendidikan	80



DAFTAR GAMBAR

II.1. Kerangka Pikir.....	45
IV. 3.Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti.....	67



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARIANA
NPM : 187310324
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Studi Pada Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti)

Dengan ketentuan fakultas dan Universitas Serta Hukum Negara Republik atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.

2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,30 Mei 2022

Pelaku pernyataan,

Mariana



**PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MENGAASI ANAK PUTUS
SEKOLAH(STUDI PADA KOTA SELATPANJANG,KECAMATAN
TEBING TINGGI,KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)**

ABSTRAK

MARIANA

(187310324)

Kata kunci : Peran, Kebijakan, Pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok serta untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya anak putus sekolah. Masalah utama dalam penelitian ini adalah kurangnya minat anak untuk sekolah,lemahnya ekonomi keluarga,teman sepergaulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data dari hasil wawancara,observasi dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena masih adanya anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah. Hal ini dikarenakan jumlah yang terdata anak yang tidak sekolah dan puus sekolah di Kecamatan Tebing Tinggi berjumlah 38 anak. Berdasarkan analisis penelitian dan kendala yang ditemukan hendaknya Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti perlu terus melakukan sosialisasi guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.sosialisasi tentang bantuan KIP(Kartu Indonesia Pintar),perlu melakukan kerjasama yang terpadu antara pihak-pihak yang terkait dalam menekankan angka anak putus sekolah secara terprogramseperti tokoh masyarakat dan orang tua siswa.

**THE ROLE OF THE EDUCATION OFFICE IN DEALING WITH SCHOOL
DRPOUTS(STUDY IN SELATPANJANG CITY,CLIFF TINGGI SUB-
DISTRICT,MERANTI ARCHIPELAGO DISTRICT)**

ABSTRAK

MARIANA

(187310324)

Keywords : role,policy,education

This study aims to detetmine and analyze the role of the meranti islands district education office in carrying out its main duties and functions as well as to determine the factors that cause children to drop out of school. The main problem in this research is the lack of interest of the family economy, and the garden of associantion. This study uses descriptive qualitative research methods with data sources from interviews,observations and documentation. Based on these results, it can be concluded that the role of the Meranti Islands Regency Education Office is not yet maximal in carrying out its suties and functions because there are still children who are not in school and drop out of school. This is because the recorded number of children who are not in school and drop out of school in the high cliff sub-district is 38 children. Based on the research analysis and the obstacles found,the Meranti Islands District Education Office should continue to carry out socialization in order to increase public awareness about the imprportance of integrated cooperation education between the parties involved in emphasizing the number of children dropping out of school in a programmatic manner sunch as community leaders and parents.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai yang di amanatkan dalam Undang-Undan Dasar (UUD) 1945, pendidikan menjadi perhatian lebih yang harus dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang dimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk mewujudkan hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan otonomi daerah yang bertanggung jawab atas pemerintahannya sendiri, maka dibentuklah azas-azas pemerintahan daerah yakni azas desentralisasi, azas desentralisasi, dan tugas pembantuan.

Berdasarkan asas desentralisasi tentunya pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah kini lebih leluasa dalam mengelola serta meningkatkan potensi yang dimiliki daerahnya termasuk sumber daya manusia. Sehingga pemerintah mempunyai peranan penting dalam menjamin hak masyarakatnya, dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat secara wilayah serta memahami dan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini kebutuhan dasar masyarakat yaitu dibidang pendidikan (Triandkk,2019).

Urusan Pemerintahan yang Konkuren merupakan urusan Pemerintahan yang dibagi atas urusan pemerintahan pusat, urusan pemerintahan daerah provinsi dan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebagaimana yang terdapat didalam pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kewenangan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan pemerintahan terdiri atas urusan Absolut, urusan Konkuren, dan Umum, dalam penelitian ini berfokus pada urusan konkuren yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan Wajib pelayanan Dasar yaitu berkaitan dengan pendidikan.

Pemerintahan Kabupaten dan Dinas Pendidikan dapat membuat program-program dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Serta mendorong terjadinya proses otonomi baik pada pemerintahan daerah maupun pada setiap satuan pendidikan agar memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, adil dan merata bagi setiap masyarakat. (Benjamin dkk, 2017)

Agar setiap daerah bisa menyelenggarakan pendidikan secara merata dan relatif tidak ketinggalan jauh dari daerah daerah lainnya, anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) di antaranya yang disalurkan melalui berbagai skema akan berfungsi sebagai faktor penyeimbang sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menerima pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan adil.(Benjamin dkk,2017)

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan ini. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dilalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalih dan alasan belum terlaksana secara maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengenyam pendidikan di bangku sekolah.(Fauzi dkk,2012).

Tabel 1.1 Anggaran Program Urusan Pendidikan Kabupate Kepulauan Meranti Tahun 2018-2021

No	Tahun	APBD	APBN	Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah (APBN) / Dana BOS (SD-SMP)	
1.	2018	17,506,778,471 M	34,529,190,060 M	17.210,880.000 M	6.144.200.000 M
2.	2019	23.675,757,655 M	48,567,908,381 M	17.355,800.000 M	6.369.000.000 M
3.	2020	20,388,773,600 M	76,851,512,000 M	18.805.050.000 M	6.650.630.000 M
4.	2021	94,340,979,793 M	73,666,380,000 M	20.649.296.000 M	7.680.742.000 M

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya anggaran pendapar daerah (APBD) meningkat, untuk tahun 2021 meningkat menjadi Rp 94,340,979,793 M sedangkan untuk anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) Rp 73,666,380,000 M. namun kenyataan di lapangan masih ada anak putus sekolah hal inilah yang menunjukkan bahwa masih kurangnya pemerataan anggaran pendidikan.

Wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah (PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar). Tujuannya ialah untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya dan dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.(Lukman)

Anak merupakan salah satu generasi muda yang nantinya akan menciptakan bagaimana bangsa ini kedepannya. Anak juga sebagai sumber daya manusia yang paling berharga karena menentukan bagaimana arah kemajuan bangsa selanjutnya. Oleh karena itu, anak juga perlu mendapatkan perhatian akan hak-hak yang harus didapatkannya, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya, kebutuhan anak seperti pendidikan tidak semuanya terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya anak yang putus sekolah yang terjadi di Indonesia. Anak putus sekolah merupakan anak yang tidak mau melanjutkan pendidikannya. Kasus anak putus sekolah ini adalah salah satu kasus yang sangat rumit dan masih sulit diatasi sampai sekarang. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi anak putus sekolah, diantaranya yaitu faktor keluarga,

geografi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu Faktor penyebab tersebut dapat diminimalisir dengan adanya kesadaran pendidikan dari seluruh pihak, baik dari pihak anak, keluarga maupun pihak lingkungan. Dengan adanya kesadaran akan pendidikan dapat menjadi dorongan yang kuat pada diri anak untuk tetap melaksanakan pendidikannya. Dengan itu, pihak yang turut berperan dalam penanganan anak putus sekolah adalah pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan diharapkan mampu membantu anak agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya (Sandhopa, 2019)

Sejalan dengan Tugas Pokok Dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan; dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki beberapa fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknik dibidang Pendidikan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendidikan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Ada juga fungsi pendidikan yaitu sebagai alat untuk membebaskan manusia dari kebodohan, penindasan, ketertinggalan dan kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia. Oleh Karena itu sangat diharapkan berbagai upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai

dengan potensi dan hambatan di masing-masing daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam BAB III mengenai “pembagian urusan pemerintahan” pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :”salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan”.

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyikapi anak putus sekolah yaitu Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar telah melakukan pembinaan pentingnya pencegahan anak rawan putus sekolah, dan Dinas Pendidikan juga telah Menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan sejumlah beasiswa untuk mendukung program wajib belajar pendidikan sembilan tahun. Melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa tentang pentingnya pendidikan atau bersekolah.

Adapun sekolah SD dan SMP di kota Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi untuk sekolah SD berjumlah 33 sekolah untuk sekolah SMP berjumlah 18 sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah instansi pemerintah yang menangani jenjang pendidikan dari SD,SMP, di Kabupaten Kepulauan Meranti terkhususnya Kecamatan Tebing Tinggi. Sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Daerah sebagai pelaksana kebijakan teknis pendidikan. Meskipun telah terdapat usaha pemerintah dalam menyikapi hal tersebut yaitu dengan pembentukan beberapa peraturan undang-undangan dalam melindungi warga Negara dalam memperoleh pendidikan. Tetapi hal tersebut belum mencukupi seluruh aspek hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pada

kenyataanya di lapangan masih ada di temukan anak yang putus sekolah. Adapun data anak putus skolah dari tahun 2018-2021.

Tabel 1.2 Data Anak Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun2018-2021 Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Anak Putus Sekolah(Tahun)	SD	SMP	Jumlah
1.	2018	20	10	30
2.	2019	15	8	23
3.	2020	13	9	22
4.	2021	5	5	10
	Jumlah	53	32	85

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti,2021

Dari tabel 1.2 dapat dideskripsikan berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa masih adanya anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahwa pada tahun 2018 kondisi anak putus sekolah mencapai 30 orang. Sedangkan tahun 2020 cendrung membaik.

Tabel 1.3 Data Peserta Didik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018-2021

No	Tahun	SD	SMP	Jumlah
1.	2018	22.259	12.275	34.534
2.	2019	22.424	9.507	31.931
3.	2020	22.415	9.719	32.134
4.	2021	20.513	15.392	35.905
	Jumlah	87.611	46.893	134.504

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti,2021

Pada tabel 1.3 terlihat bahwa dari tahun 2018-2021 terjadi peingkatan jumlah peserta didik. Dengan membandingkan antara dua data tersebut bisa dilihat

bahwa ada tindakan atau pun kebijakan dari dinas pendidikan agar membentuk penanganan anak putus sekolah.

Salah satu daerah yang menjadi perhatian karena tingkat pendidikan yang cukup rendah adalah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini lah yang harus di perhatikan oleh dinas pendidikan. Dimana sampai saat ini belum ada langkah konkrit dari dinas pendidikan setempat dalam mengatasi anak putus sekolah.

Maka dari itu banyak anak putus sekolah di Kecamatan Tebing Tinggi putus sekolah, masyarakat setempat berpenghasilan dari perkebunan dan nelayan, itu pun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bukan itu saja lingkungan juga berpengaruh pada pendidikan dan juga kurangnya perhatian orang tua mengenai pendidikan. Maka dari itulah banyak siswa-siswi Kecamatan Tebing Tinggi yang putus sekolah. Adapun jumlah data anak putus sekolah sapat dilihat pada tabel dbawah ini .

Tabel 1.4 Data Anak Putus Sekolah berdasarkan Perkecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti 2021

No	Kecamatan	SD	SMP	Jumlah
1.	Tebing Tinggi	5	5	10
2.	Tebing Tinggi Barat	6	6	12
3.	Tebing Tinggi Timur	7	1	8
4.	Rangsang	0	2	2
5.	Rangsang Basar	0	2	2
6.	Rangsang Pesisir	0	0	0
7.	Merbau	0	1	1

No .	1	2	3	4
8.	Pulau Merbau	0	1	1
9.	Tasik Putri Puyu	2	5	7
	Jumlah	23	15	43

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti 2021

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa masih adanya kondisi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, kondisi anak putus sekolah pada tahun 2021 mencapai angka 43 anak. Kondisi demikian dapat dimaknai bahwa masih ada angka anak putus sekolah ang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kondisi anak putus sekolah untuk anak usia sekolah tentunya sangat memprihatinkan karena dimasa ini seharusnya anak- anak dapat menikmati pendidikan yang baik,

Rendahnya tingkat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah guna memajukan peradaban dan tingkat kehidupan yang lebih baik dan mandiri. Rendahnya tingkat pendidikan mendorong timbulnya berbagai permasalahan sosial yang kian hari semakin meresahkan bangsa Indonesia. Salah satu faktor yang dapat menjadi tolak ukur rendahnya tingkat pendidikan adalah tingginya angka putus sekolah anak usia produktif (usia sekolah). Selain tingginya angka putus sekolah, rendahnya minat anak bahkan orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dirasakan masih sangat kurang.(kusbowo,2016)

Adapun satu hal pokok di atas dapat menjadi satu alasan betapa rendahnya tingkat pendidikan yang memang bila ditelaah lebih mendalam bukan hanya

pemerintah saja yang perlu berpikir jauh, namun masyarakat dan tentunya para orang tua harus memahami benar betapa pentingnya pendidikan untuk bekal hidup maupun sebagai anggota dalam sistem tatanan masyarakat yang berbangsa dan bernegara.(kusbowo,2016).

Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa. Anak adalah bagian dari generasi muda,penerus cita-cita,dan perjuangan bangsa. Selain itu, anak merupakan sumber daya manusia yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari berbagai ancaman dari gangguan agar supaya hak-haknya tidak terabaikan. Pemerintah,masyarakat dan lingkungan setempat bertanggung jawab atas terjadinya fenomena anak putus sekolah yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi,terlebih khususnya Dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak dasar masyarakat untuk mengenyam pendidikan,untuk menciptakan anak-anak dan masyarakat yang maju,berkualitas,sejahtera dan mandiri dengan membangunkeunggulan kompratif dimasing-masing wilayah dan didukungoleh kualitas,kapasitas sumber daya manusia yang harus lebih baik,sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang direncanakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari uraian di atas penulis melihat ada beberapa fenomena yang mendukung diadakannya penelitian ini antara lain :

1. Masih adanya anak putus sekolah dikarenakan faktor eksternal yakni ekonomi keluarga yang lemah yang menyebabkan berbagai problem yang

berhubungan dengan pemenuhan biaya hidup sehingga anak sering dikutsertakan dalam menompon kebutuhan ekonomi keluarga ekonomi keluarga dan pada akhirnya mengganggu kegiatan belajar dan kesusahan mengikuti pelajaran.

2. Belum adanya solusi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap anak putus sekolah di Kecamatan Tebing Tinggi dan kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan hal ini dibuktikan dengan dihapusnya Unit pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan Kepulauan Meranti
3. Masih rendahnya pemerataan anggaran dalam memperoleh pendidikan hal inilah yang menyebabkan kurang optimalnya dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Riau seperti belum adanya tindak lanjut dari Dinas Pendidikan mengenai anak putus sekolah.
4. Belum tercapainya tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana masih banyaknya anak putus sekolah dalam hal ini terdapat pada Kecamatan Tebing Tinggi.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan dilapangan sesuai yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian “Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah(Studi Pada Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti”

B.Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan persoalan yang ditemui, maka dapat penulis rumuskan masalah penelitian, dengan : “Bagaimana Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Studi Pada Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti)”

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Studi Pada Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Studi Pada Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti).

2.Kegunaan Penelitian

a. Aspek Teoritis

secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan terutama akan pentingnya pendidikan. Dan diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam memperhatikan masyarakat putus sekolah.

b.Aspek Akademisi

bagi para akademis dan pembaca, dapat dijadikan sumber atau alternatif dalam mengembangkan pengetahuan tentang Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah(Studi Pada Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti).

c.Aspek Empiris

sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin meneliti di bidang yang sama



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep ilmu pemerintahan

Konsep ilmu pemerintahan dapat di artikan dalam artian luas dan artian sempit yaitu tugas dan wewenang pemerintahan itu sendiri dapat di perluas dan di persempit degan membentuk organ-organ pemerintahan dalam pemerintahan itu sendiri guna mempermudah pembagian tugas dan weweang yang berbeda dalam mencapai tujuan yang sama. Sebagaimana menurut Talidzidulu Naraha dalam syafiie (2011:63) bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orangakan jasa public dan layanan public dalam hubungan pemerintahan saat di butuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Menurut C.F Strong (dalam Safiie 2011:22) mendefinisikan bahwa ilmu pemerintahan mempunyai arti luas yakni kewenangan dalam memelihara kedamaian dan keamanan Negara didalam dan diluar. Olehh karena itu 1)Negara harus memiliki kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang,2)Negara harus memiliki kekuatan legislatif atau pembuatan undang-undang dan peraturan lain,3)Negara harus memiliki kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat

dalam membiayai ongkos keberadaan Negara menyalenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dilanjutkan dengan pendapat Musanef (dalam Syafiie 2011:7) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang menguasai, memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ledalam dan hubungan antar dinas-dinas dengan masyarakat sehingga kepentingan di wakili oleh dinas itu.

Menurut pendapat Ndraha (2005:36) pemerintah adalah semua badan/orgaisasi yang fungsinya untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan kebutuhan dan kepentingan mausia dan masyarakat.

Dari penjelasan di atas ,jelas bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintah menurut rasyid (1997:11) yaitu untuk menjaga suatu system ketertiban dunia masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar pada hakikatnya adalah pelayanan pada masyarakat,pemeritah sebagai pelayanan massyarakat bukan pula untuk pelayaan diri sendiri dan menciptakan setiap lapisan masyarakat dapat memiliki kemampuan dan memiliki kreativitas dalam mencapai tujua yang sama secara bersama.

Dalam menjalankan tugas Negara tersebut, pemeritah memiliki fungsi dasar menurut Ndraha (2000:78-79),yaitu :

1. Fungsi Primer (fungsi pelayanan)

Yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia jasa-jasa public yang tidak bisa di privatisasi termasuk jasa pertahanan dan keamanan, layanan sipil, serta birokrasi.

2. Fungsi Skunder

Yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan barang dan jasa yang tidak mampu dipenuhi sendiri karena tidak ada kemampuan masyarakat dan tidak berdaya dalam penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

2. konsep Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, daerah adalah masyarakat hukum (ada batas-batas yang ditentukan), dan yang di maksud dengan pemerintahan adalah pemerintahan pusat dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan asas otonomi dan tugas pembantu. Otonomi yang seluas-luasnya diberikan oleh pemerintahan pusat kepada daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan ini, daerah harus memperbaiki demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman tiap-tiap daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dengan

dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 59 disebutkan bahwa setiap dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, sedangkan untuk Daerah Kabupaten adalah Bupati, dan untuk Daerah Kota adalah Walikota.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 208, bahwa Kepala Daerah dan DPRD dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibantu oleh perangkat Daerah, kemudian didalam pasal 209 perangkat Daerah terdiri dari :

1. perangkat Daerah Provinsi terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas, dan
- e. Badan

2. perangkat Daerah Kabupaten/ terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah

- b. Secretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan,dan
- f. Kecamatan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 217, Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusa Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

3. Konsep Peran

Pemerintahan pada dasarnya adalah sebuah sistem social. Unsur terkecil dari sistem social adalah norma-norma (norms) yang bersangkutan yang kemudia menciptakan peran-peran (roles). Himpunan peran-peran akan membentuk sebuah status. Himpunan dan hubungan fungsional antara status akan menciptakan sebuah situs social. Ada lima elemen yang membangun sebuah sistem social, kemplima elemen tersebut yaitu :

- a) Norma, sebagai unit terkecil dari sistem social (the norms)
- b) Peran-peran (roles) merupakan struktur keda yang terdiri dari norma-norma.
- c) Status posisi atau posisi (the status-position), yang menggambarkan lokasi actor dalam sistem social.
- d) Situs (a situs), menggambarkan status posisi actor dalam sistem social yang kompleks dibandingkan status-sosial actor lain.

- e) Lingkungan (ststion), menggaribakan lokasi actor di dalam komunitas yang di dalamnya terdapat stratifikasi social.

Peran menurut poerwadarminta (1995:751) adalah “ tindakan yang di lakukan seseorang atau kelompok orang dalam suatu peristiwa”berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau kelomok orang dalam peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat.kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut Levison (soekanto,2012:213) mengatakan peran mencakup tiga hal yaitu :

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Selanjutnya menurut Ali (2005:148),Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutaa yang dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan

adanya posisi tertentu maka seseorang yang memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peranannya atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) pengertian peranan adalah sebagai berikut : peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Konsep tentang peran (role) menurut Komaruddin (1994:768) dalam buku “ensiklopedia manajemen” mengungkapkan sebagai berikut :

- a) Bagian dari tugas utama dilakukan oleh manajemen:
- b) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu pranata:
- c) Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata:
- d) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya:
- e) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan yang dianjurkan (“PRESCRIBED ROLE”) dan peranan yang dijalankan (“ENACTED”). Dalam melaksanakan sesuatu peranan tertentu kita diharapkan oleh masyarakat agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Keadaan semacam ini disebut sebagai “prescribed role”(peranan yang dianjurkan). Tetapi adakalanya orang-orang yang diharapkan ini tidak berperilaku menurut cara-cara yang konsisten dengan harapan-harapan orang lain. Mereka masih bisa dianggap menjalankan peranan-peranan yang diberikan

oleh masyarakat walaupun tidak konsisten dengan harapan-harapan si pemberi peran. Keadaan seperti ini disebut sebagai “enacted role”(peranan nyata) yaitu keadaan sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. Ketidaksieleraan pelaksanaan kedua peranan tersebut mungkin disebabkan oleh :

- a) Kurangnya pengertian para individu terhadap persyaratan –persyaratan bagi peran yang harus ia jalankan.
- b) Kesenjangan untuk bertindak menyimpang dari persyaratan peranan yang diharapkan.
- c) Ketidakmampuan individu memainkan peranan tersebut secara efektif.

Menurut Mintzberg dalam buku pengantar Manajemen dan buku Kepemimpinan Dalam Manejmen yang ditulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 12 dan 21), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu :

1. peran antar pribadi (interpersonal role) dalam peranan antar pribadi, atasan baru tindakan sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antar pribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peranan sebagai tokoh (figurehead) yaitu yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.

- b. Peranan sebagai pemimpin (leader), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan.
- c. Peranan sebagai pejabat perantara (liaison manager), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berbeda diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (informational role), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:

- a. Peran pemantau (monitor). Peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi
- b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menangani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang didampingnya.

3. Peranan pengambilan keputusan (decisional role), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena.

- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
- b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terharu dan nilai-nilai organisasi.
- c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol; atas semuanya. Diakses melalui website.

3.1. Perubahan dan Prestasi Peranan

Agar seseorang bisa melaksanakan peranannya dengan baik dia harus memiliki kepribadian yang menunjang pelaksanaan peran tersebut. Namun tidak semua individu memiliki jenis kepribadian seperti itu yang memungkinkan mereka bisa melaksanakan peranan mereka masing-masing secara efektif. Kebanyakan individu mengalami kesulitan dalam menjalankan peran-peran yang telah ditentukan oleh masyarakat yang sebetulnya merupakan bagian kehidupan mereka sejak mereka dilahirkan. Peran-peran prestasi biasanya diterima dan dijalankan para individu setelah mereka bisa membentuk kepribadian sendiri. Itulah sebabnya mengapa orang-orang tertentu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri menjalankan peran secara efektif.

3.2. Kesenjangan Peranan (“ROLE DISTANCE”)

Seseorang yang menjalankan peranannya secara emosional akan menampakkan ciri yang disebut sebagai “role distance”(kesenjangan peranan). Hal ini sering terjadi apabila peran yang harus ia jalankan itu tidak memperoleh prioritas tinggi dalam hidupnya. Lain halnya apabila peranan yang harus ia jalankan itu sesuai dengan seeranya dan dirasakan bermanfaat,maka ia akan menjalankannya secara sungguh-sungguh. Pelaksanaan peranan memang sering disertai dengan ketegangan atau tekanan psikologis yang terusberlangsung sampai individu itu sendiri merubah prioritasnya dan bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa peranannya adalah suatu yang positif.

3.3. Peran Elit

Berdasarkan penjelasan teori peran seseorang bias dikatakan berperan apabila ia menjalankan suatu fungsi maka ia dikatakan berperan, sedangkan elityaitu sebahagian atau sekelompok kecil dari masyarakat yang menjalankan tugas dan fungsiya,sehingga struktur yang dipegang.peranan sebagai suatu modernisasi terdapat dua lapisan yaitu peran elit cendikiawan dan peranan elit dari golongan pemerintahan. Dimana sebagai golongan elit cendikiawan merupakan golongan elit yang berasal dari golongan terkecil dalam masyarakat yang memainkan peran sedangkan elit pemerintahan yaitu elit yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai struktur yang dibentuk.

3.4.Peran Elit Pemerintahan

Sebagai dengan penjelasan beberapa uraian diatas mulai dari teori peran teori elit,teori peran elit maka jika dihadapkan dengan suatu organisasi akan

melahirkan peran elit pemerintahan, saat organisasi pemerintahan menempatkan jabatan structural dalam menjalankan tugas dan fungsi, melayani masyarakat sebagai penyelenggaraan pelayanan public, sehingga elit pemerintahan itu bisadikatan berperan. Sirkulasi elit dipertegaskan oleh Suzanne Keller dimana sirkulasinya menjelaskan bahwa jika Elit itu berpotensi politik maka tingkatan terluar akan mendesak untuk masuk pada lingkaran paling dalam sehingga memperbolehkan kekuasaan, melalui lingkaran-lingkaran kekuasaan terdekat yang disidak untuk masuk kedalam. Namun terjadi sebaliknya semakin jauh seseorang berada pada lingkaran tersebut maka semakin kekuasaan ini tidak dipakai.

Elit politik yang menduduki jabatan pada pemerintahan mengalami pergeseran peran, dari yang berorientasi pada kekuasaan kemudian saat beberapa pada structural pemerintahan dia harus memajukan peran sebagai Elit Pemerintahan. Jika pergeseran ini tidak dimainkan secara baik maka proses penempatan struktur dalam menjalankan tugas dan fungsi akan mengalamikemunduran sehingga Elit yang terjadi berorientasi pada kekuasaan tdk akan bias berperan sebab tidak bias menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan struktur yang berdampak kepada pelayan public.

4.Konsep Kebijakan

Menurut Ndraha (2003:492-499) kebijakan berasal dari kata “policy” yang artinya sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang terkait secara formal meningkat.

Menurut Eyestone (dalam Winarno,2007:17) kebijakan didefenisikan sebagai suatu unit pemerintahan dengan lingkungan,konsep yang dijelaskan oleh eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas da kurang pasti karena apa yang dimaksud degan kebijakan public menyangkut banyak hal.

Dipertegas oleh pendapat Bogue dan Saunders (dalam syafarudin 2008:76) menyimpulkan bahwa kebijakan adalah menjelaskan sasaran umum organisasi yang berisikan alasa bagi keberadaan dan mengarahkan pembuatan keputusan dalam mencapai sasaran.

Menurut Nicholes (dalam syafarudin 2008:76) kebijakan adalah suatu keputusan yag dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pembuat keputusan akhir dan bukan kegiatan yang berulang,rutin yang terprogram dan saling terkait dengan aturan-aturan suatu keputusan.

5.Konsep Kebijakan Publik

Menuut Thomas R Dye(Islamy,2009,p.19)bahwa kebijakan public ialah”whatever governments choose to do or not to do”, yaitu apapun yang di pilih oleh pemeritah baik dilaksanakan atau tidak dilaksanakan . dari defeisi ini menekankan bawa kebijakan public adalah sebagai suatu bentuk “tindakan” dan tidak hanya sebagai keinginan pemerintah untuk tidak mejalankan kebijakan publik karena akan berpengaruh (menimbulkan dampak dengan pilihan pemerintah). Dye juga berpendapata bahwa kebijakan publik sebagai upaya guna mengetahui apa yang benar-benar dilakukan oleh [emerintaha,mengapa mereka

melakukannya, dan apa yang menyebabkan dalam praktik pemerintah melakukan dengan cara yang berbeda-beda.

Pendapat tersebut dipertegas oleh Wibawa (2011:3) kebijakan public adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana yang menjelaskan cara-cara dalam mencapai suatu tujuan.

Kebijakan public merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajaran dan masyarakat dalam memecahkan suatu masalah tertentu. Permasalahan dimasyarakat yang seharusnya diselesaikan adalah sangat luas yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Maka dalam hal ini diperlukan kebijakan-kebijakan public yang sesuai dan terarah supaya tujuan yang hendak dicapai berhasil secara efektif dan efisien (Adisasmita, 2011:113).

6. Konsep Implementasi Kebijakan

Good governance menurut pelaksanaan atau upaya merancang bangun rumusan kebijakan, proses implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Hal ini saling melengkapi satu sama lain yang merupakan fokus utama dari ilmu pemerintahan. Sebagai suatu rancang bangun implementasi kebijakan tak lahir dengan sendirinya melainkan berasal dari konsep kebijakan publik (public policy).

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006:634) dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of implementation). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi

kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b) Jenis manfaat yang dihasilkan
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuatan kebijakan
- e) Siapa pelaksana program
- f) Sumber daya yang di kerahkan

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (context of implementation) mencakup :

- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat:
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa
- c) Kepatuhan dan daaya tanggap.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (coten of implementation), serta kodisi sumberdaya, infrastruktur perlu pemahaman yang komprehensif.

Menurut Grindle dalam Wirawan (2012:45) menjelaskan implementasi kebijakan sesungguhnya adalah tak sekedar terkait dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur lewat saluran-saluran biokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan, oleh sebab itu tak salah jika

dikatakan bahwa implementasi kebijaksanaan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan.

Model implementasi kebijakan yang bertipe top down dikembangkan oleh Edward III (dalam Leo, 2008; 149) yang disebut dengan implementasi kebijakan public dengan *directly* dan *indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan yang dikembangkan oleh Edward III, ada 4 variabel yang sangat menentukan suatu kebijakan yaitu :

1. Komunikasi. Dalam rangka berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan maka implementator harus mengetahui apa yang akan ia dilakukan. Apa yang menjadi sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Jika tujuan dan sasaran tidak jelas maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber Daya. Apabila isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kurang sumber daya untuk menjalankan kebijakan, implementasi tidak akan dapat berjalan efektif. Sumber daya ini termasuk yakni sumber daya manusia, yaitu kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan factor urgent dalam implementasi kebijakan supaya berjalan dengan efektif.
3. Disposisi/sikap. Disposisi adalah watak dan karakter yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Jika implementator memiliki disposisi yang baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuatan kebijakan.

4. Struktur biokrasi . struktur organisasi yang memiliki tugas mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang urgent dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang menjasi standar.

7.Konsep Pendidikan

Secara simologi,kata pendidikan berasal dari kata dasar “didik”yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran pe-an. Berubah menjadi kata kerja mendidik,yang berarti membantu anak untuk menguasai anekapengetahuan,keterampilan,sikap dan nilai yang diwarisi dari keluarga danmasyarakat. Istilah pendidikan ini berasal dari bahasa yunani yaitu “*paedagigie*”,yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak, dan *paedagogia* adalah pergaulan dengan anak-anak,istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan “*education*” yang berarti pembangunan atau bimbingan.

Menurut Panagan (dalam Saputra,2017) Pendidikan adalah tiang puncang kebudayaan dan pondasi utama untuk membangun peradaban bangsa. Kesadaran akan arti penting pendidikan dalam menentukan kualitas kesejahteraan lahir batin dan masa depan warganya. Oleh dari itu subtansi pendidikan,materi pengajaran dan metodologi pembelajaran, serta manajemen pendidikan yang akuntabel susah seharusnya menjadi perhatian bagi para penyelenggara Negara, Terbukti bahwa seluruh bangsa yang berhasil mencapai tingkat kemajuankebudayaan dan teknologi tinggi mesti disangga oleh kualitas pendidikan yang sangat kokoh.

Dalam dictionary of Education menyebutkan bahwa pendidikan adalah dimana proses seseorang mengembangkann kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku di dalam masyarakat dimana ia hidup,proses sosial yaitu dimana orang akan dihadapkan oleh pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga mereka bisa memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman siswa yang pertama pada tahun 1930,pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin,karakter),pikiran (intelek),dan tubuh anak.tidak boleh dipisah-pisahkan bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup,kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kta didik selaras dengan dunianya (Fuad Ihsan,2011:4).

Pendidikan adalah instusi pendidikan yang formal, dan instusi pendidikan formal terpenting dalam masyarakat kita adalah bersekolah yang menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang persekolahan sampai ke jenjang pendidikan tinggi yang bersifat umum maupun khusus.(Sunarto,2004:65)

Adapun fungsi pendidikan adalah sebagai alat untuk membeaskan manusia dari kebodohan, penindasan, ketertinggalan dan kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia. Dengan demikian diharapkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat direncanakan secara tepat sasaran sesuai dengan potensi dan hambatan di masing-masing daerah.(fitriani,2018)

Tujuan pendidikan adalah suatu factor yang dimana sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan ini adaah arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju olehn pendidik. Dalam penyelenggaraannya pendidikan tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapai, hal ini dapat dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang di alami bangsa Indonesia Tujuan pendidikan yang berlaku pada masa Orde Lama berbeda dengan tujuan pendidikan pada masa Orde Baru. Sejak Orde Baru hingga sekarang, urusan mengenai tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia (Rahmat Hidayat,2019:25).

Unsur-unsur yang terdiri dalam sebuah pendidikan dalam hal ini adalah :

- a) Usaha (kegiatan) usaha ini bersifat bimbingan (pimpinan atau pertolongan) dan dilakukan secara sadar;
- b) Ada pendidik, pembimbingan atau penolong;
- c) Ada yang terdidik atau di terdidik;
- d) Bimbingan yang mempunyai dasar dan tujuan;
- e) Dalam usaha itu tentu terdapat alat-alat yang di pergunakan.

Selanjutnya macam-macam tujuan pendidikan (Yusuf, 2018;31-32) sebagai berikut:

1. Tujuan umum; Rumusan tujuan umum pendidikan adalah rumusan tujuan pendidikan yang bersifat luas dan mencakup seluruh hakekat kemanusiaa

secara universal. Tujuan umum pendidikan biasanya dirumuskan dengan memperhatikan aspek-aspek yang bersifat universal.

2. Tujuan khusus; Tujuan khusus pendidikan merupakan penjabaran yang bersifat detail dari rumusan tujuan umum pendidikan tujuan khusus biasanya ditentukan karena adanya factor-faktor lain sehingga tujuan pendidikan yang akan dicapai menjadi bersifat khusus pula. Misalnya perbedaan lingkungan social masyarakat, perbedaan institusi lembaga pendidikan, atau bahkan perbedaan adat istiadat yang bersifat lokal.

Menurut Dwi Nugroho Hidayanto (dalam Yusuf,2018;34) yang bertanggung jawab atas pendidikan itu meliputi :

- a) Orang dewasa
- b) Orang tua
- c) Guru
- d) Pemimpin masyarakat
- e) Pemimpin agama

Melihat berbagai defenisi pendidikan diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pendidikan sangat penting bagi siswa dan siswi agar terwujudnya kepribadian yang baik pada diri setiap anak. Dan harapan terhadap dunia pendidikan sangat besar karena bias membawa peserta didik kearah yang memiliki kualitas hidup yang baik.

8.konsep Anak Putus Sekolah

Singgih (dalam Rahmad dkk,2016) mengutarakan bahwa anak adalah generasi penerus bagi kalangan hidup keluarga,bangsa dan Negara di masa mendatang.Karena itu bisa memberikan jaminan bagi generasi penerus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik merupakan investasi sosial masa depan yang tidak murah dan harus dipikul oleh keluarga,masyarakat dan Negara.

Menurut E.M. Sweeting dan Muchlisoh dalam laporan teknis Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum (1998:14) mengatakan bahwa Siswa yang putus sekolah merupakan siswa yang tidak melanjutkan pendidikan selama 6 tahun sekolah dasar dan karena itu mereka tidak memiliki ijazah SD. Pengertian mengenai siswa putus sekolah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah siswa yang belum sampai tamat sekolahnya sudah berhenti. Pendapat dari Ali Imron,(2004:125) menyatakan bahwasanya yang dimaksud siswa putus sekolah adalah siswa yang dinyatakan telah keluar dari sekolah yang bersangkutan sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum dinyatakan lulus dan mendapat ijazah dari sekolah.

Menurut Gunawan (2011:91) bahwa anak putus sekolah adalah predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak bisa menyelesaikan suatu jenjang pendidikan,sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan berikutnya,hal ini menyatakan putus sekolah ditujukan oleh seorang yang pernah bersekolah namun berhenti untuk bersekolah.

Menurut Musfiqon(dalam Saputra,2017) putus sekolah adalah proses dimana siswa/siswi tersebut secara terpaksa berhenti dari suatu lembaga

pendidikan dimana tempat dia belajar. Itu berarti adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang memadai.

Menurut Darmaningtyas (dalam Dewi dkk, 2014), fenomena anak putus sekolah adalah suatu keadaan terhentinya aktivitas pendidikan pada anak-anak usia sekolah, baik itu pendidikan formal maupun.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai pengetahuan dari siswa putus sekolah, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa siswa/siswi yang putus sekolah adalah siswa yang tidak melanjutkan pendidikannya atau memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya di sekolah dasar.

8.1. faktor penyebab siswa putus sekolah

Siswa yang putus sekolah pastinya tidak datang secara sendiri menima diri siswa tersebut. Pastinya ada faktor yang melatar belakangi hal itu bisa terjadi dalam hasil kajian yang dilakukan oleh Sukmadinata (Bagong Suyanto 2010:324) mengatakan bahwa ada faktor utama siswa putus sekolah adalah kesulitan di bidang ekonomi atau dikarenakan orang tua siswanya tidak mampu untuk menyediakan biaya bagi putra-putrinya untuk bersekolah.

Sedangkan menurut Ahmad (dalam Wassahua, 2016) menyatakan bahwa ada beberapa faktor menyebabkan anak mengalami putus sekolah yaitu :

- a) Adat istiadat tertentu

- b) Lemahnya kemampuan murid untuk meneruskan belajar dari satu kelas ke kelas selanjutnya
- c) Kecilnya pendapatan orang tua
- d) Kurangnya perhatian dari pihak sekolah

Sementara itu pendapat lain mengenai faktor penyebab siswa putus sekolah juga disampaikan oleh Nana Aukmadinata (Bagong Suyanto 2010:342-343) yang menyatakan bahwa jumlah faktor yang melatar belakangi mengapa siswa sampai tinggal kelas adalah sebagai berikut :

- a. System yang digunakan oleh sekolah tersebut. Biasanya sekolah-sekolah pada umumnya akan menggunakan sistem maju secara berkelanjutan atau maju secara otomatis, namun jika sekolah tersebut menggunakan system tidak naik kelas, maka bisa dimungkinkan akan lebih banyak siswa yang putus sekolah akibat malu dikarenakan akan bertemu dengan adik kelasnya di semester berikutnya.
- b. Erhubungan langsung dengan kemampuan usaha dari siswa tersebut. Bisa dikatakan bahwa siswa yang mempunyai semangat belajar yang tinggi akan mempengaruhi prestasi yang akan didapatkan, sedangkan siswa yang mempunyai daya tarik yang lemah terhadap belajar. Maka dimungkinkan prestasi belajarnya juga akan kurang. Oleh karena itu siswa dengan factor yang kurang seperti ini mempunyai peluang untuk putus sekolah yang tinggi.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Ali Imron (2004:126) menyebutkan bahwa hal yang menyebabkan siswa bisa putus sekolah adalah sebagai berikut:

- a. orang tua tidak mempunyai biaya untuk sekolah putra/putrinya. Hal ini sering ditemui bagi orang tua yang ada di daerah pedesaan dan masyarakat yang hidup dalam kantong-kantong kemiskinan.
- b. Karena sakit yang di deritanya tidak tau kapan sembuhya. Sakit yang di derita siswa tersebut yang terlalu lama menyebabkan siswa merasa tertinggal banyak mata pelajaran yan diajarkkan oleh guru di sekolah,maka keputusan yang dipilih siswa tersebut memilih untuk tidak sekolah melihat teman-teman sebayanya yang sudah hampir menyelesaikan sekolah.
- c. Siswa yang terpaksa untuk bekerja demi menyambung hidup keluarga keterpaksaan siswa untuk bekerja dalam hal ini menyebabkan siswa tidak fokus pada sekolah saja, melainkan harus bercabang untuk sekolah dan bekerja, alhasil yang di dapatkan adalah kelelahan fisik yang didapatkan siswa dikarenakan untuk bekerja dan tidak dapat dibagi dengan kegiatan sekolah,hal ini menjadikan pasa saat sekolah siswa menjadi tidak kosentrasi dan lelah.
- d. Karena di droup_out dari sekolah yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan sekolah merasa tidak mampu untuk mendidik siswa tersebut dikarenakan beberapa hal,yaitu karena siswa tersebut mempunyai kemampuan berpikir yang rendah, atau bisa jadi karena siswa yang bersangkutan tidak punya lagi gairah untuk sekolah dan belajar

- e. Faktor yang berasal dari siswa itu sendiri,yaitu keinginan siswa itu sendiri yang ingin putus sekolah atau tidak ingin melanjutkan sekoah ke tingkat berikutnya.

Selanjutnya Halik (dalam Tarim,2020) menguraikan beberapa factor penyebab anak putus sekolah antara lain yaitu :

1.Faktor Internal

- a. dari dalam diri. Anak putus sekolah di akibatkan malas untuk pergi sekolah karena merasa rendah diri, tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya,sering diledak karena tidak sanggup membayar kewajiban biaya sekolah yang disebabkan oleh beragam faktor. Lemahnya ekonomi keluarga dalam menanggung biaya pendidikan akan berdampak pada masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa beradaptasi dengan baikdalam pergaulan dengan teman sekolahnya.
- b. Peranan lingkungan karena pengaruh teman yang mengajaknya untuk bermain seperti play stasion hingga akhirnya sering absendan tidak naik kelas,prestasi di sekolah menurun dan akhirnya malu pergi kembali ke sekolah
- c. Anak yang dapat sanksi karena membolos sekolah sehingga terkena Droup Out.

2.Faktor Eksternal

- a. keadaan status ekonomi keluarga, dalam keluarga yang lemah secara ekonomi rentan timbul berbagai problem yang berhubungan dengan pemenuhan biaya hidup anak sehingga anak sering diikutsertakan dalam menopang pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sehingga masalah finansial ini membebani si anak yang pada akhirnya mengusik kegiatan belajar dan kesusahan mengikuti pelajaran
- b. perhatian orang tua. Kurangnya atensi orangtua rentan akan memicu berbagai persoalan. Semakin besar anak, atensi orang tua semakin dibutuhkan, dengan cara dan variasi yang sesuai dengan kemampuan. Anak menjadi nakal salah satu akibat dari kurangnya atensi orang tua.
- c. Kurangnya keharmonisan orang tua. Hubungan keluarga tidak harmonis dapat berupa perceraian orang tua, hubungan antar keluarga tidak saling peduli, keadaan ini mengawali anak mendapatkan permasalahan yang serius dan hambatan dalam pendidikannya sehingga menyebabkan anak mengalami putus sekolah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya penelitian untuk dapat mencari perbandingan, menemukan inspirasi dalam penelitian, membantu menemukan fokus dalam suatu penelitian dan dapat menunjukkan suatu penelitian yang orisinal atau tidak plagiat.

Adapun penelitian ini sebelumnya telah ada penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi peneliti dan menjadi perbandingan peneliti dalam menentukan

fokus masalah penelitian. Pada bagian ini peneliti memaparkan ringkasan hasil penelitian yang terdahulu terkait dengan penelitian yang akan di lakukan peneliti. Berikut adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti :

1..Fani Fitriani tahun 2013-2015 dengan judul Peran Dinas Pendidikan Dalam Perumusan Pelaksanaan Pencegahan Anak Rawan Putus Sekolah di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015. Lokasi penelitian di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Dinas Pendidikan dalam perumusan pelaksanaan pencegahan anak rawan putus sekolah di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan yaitu Kewenangan Pemerintahan, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah anak-anak yang berpotensi putus sekolah yaitu pengaruh lingkungan, masalah ekonomi keluarga, mendapatkan nilai jelek, pernah tidak naik kelas, sering bolos sekolah.

2. Ricardo Saputra 2017 dengan Judul *Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2012-2015*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mengatasi Anak Putus Sekolah di tingkat Pendidikan Sekolah Dasar dari tahun 2012 hingga 2015. Metode penelitian yang digunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peran Thoha (2007:44). Hasil dari penelitian ini yaitu mengatasi anak putus sekola pada jenjang pendidikan SD Tahun 2012-2015 bukan kinerja baik secara optimal karena indicator dampak(impacts) masih lemah

pengawasan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang dana BOS sehingga terdapat indikasi penyalahgunaan dana BOS.

3. Anggraini, Helda (2014) *Peran Dinas Pendidikan Kota Medan Dalam Menangani Anak Putus Sekolah Sesuai Dengan UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas*. penelitian ini dilakukan di jalan pelita IV No.77, Kampung Durian, Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya tingkat Putus Sekolah di Kota Medan mengalami penurunan, data ini didapat dari data pokok Pendidikan dari tahun 2005 s/d 2012.

4. Yani Takua (2018) *Peran Stakeholder Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Ambon, Provinsi Maluku. Teknik Metode yang digunakan adalah Instrument penelitian, Pedoman Wawancara (Interview Guide) . Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Ambon secara jelas berusaha untuk mengoptimalkan dan meminimalisasi serta menekan angka anak putus Sekolah di Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon juga terus mengupayakan agar tingkat Anak Putus Sekolah dapat ditekan sekuat- kurangnya dan bila perlu sampai tuntas.

5. ahmad Fauzi Tahun 2012 dengan judul *Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peranan pemerintahan daerah dalam menekan angka anak putus Sekolah di Kabupaten Wajo. Metode penelitian yang di gunakan yaitu

Pendekatan Kualitatif. Lokasi Penelitian di Kabupaten Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya atau peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo diantaranya mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, program bantuan siswa miskin (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat.

Table.II.1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Fani Fitriani	Peran Dinas Pendidikan Dalam Perumusan Pelaksanaan Pencegahan Anak Rawan Putus Sekolah di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015.	-Judul -Lokasi penelitian -Teori Kewenangan Pemerintah	-Metode penelitian -Konsep Pendidikan -Membahas tentang anak putus sekolah
2.	Ricardo Saputra	Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2012-2015	-Judul -Lokasi Penelitian -Memakai indicator dampak	-Metode Penelitian -Konsep Pendidikan -Membahas tentang anak putus Sekolah
3.	Anggraini, Held a	Peran Dinas Pendidikan Kota Medan Dalam Menangani Anak Putus Sekolah Sesuai Dengan UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas.	-Judul -Lokasi Penelitian	-Metode Penelitian -Konsep Pendidikan -Membahas tentang anak putus sekolah
4.	Yani Takua	Peran Stakeholder Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon.	-Judul -Lokasi Penelitian	-Metode Penelitian -Konsep Pendidikan -Membahas tentang anak putus sekolah

No	1	2	3	5
5.	Ahmad Fauzi	Analisis Peranan Pemerintahan Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo	-Judul -Lokasi Penelitian	-Metode Penelitian Membahas tentang anak putus sekolah -Konsep Pendidikan

Dari kelima penelitian tersebut dapat diketahui beberapa perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang dilakukan. Perbedaan dan persamaan tersebut yaitu :

a. Perbedaan

Pada penelitian pertama berbeda dengan penelitian ini yaitu dari segi judul, lokasi penelitian yang dilakukan di Pekanbaru dan fokus penelitian Peran Dinas Pendidikan dalam perumusan pelaksanaan pencegahan anak rawan putus sekolah di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan yaitu Kewenangan Pemerintahan.

Pada Penelitian Kedua yang berada dengan penelitian ini yaitu dari segi judul, lokasi penelitian di kota Pekanbaru dan teori yang digunakan teori Peran Thoha (2007), Fokus Penelitian mengatasi anak putus sekola pada jenjang pendidikan SD Tahun 2012-2015 bukan kinerja baik secara optimal karena indicator dampak(impacts) masih lemah pengawasan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang dana BOS sehingga terdapat indikasi penyalahgunaan dana BOS.

Penelitian ketiga yang berbeda yaitu dari segi judul, lokasi penelitian di penelitian ini dilakukan di jalan pelita IV No.77, Kampung Durian, Medan dengan fokus penelitian pada tujuan dan sasarannya

Hasil dari penelitian ini bahwasanya tingkat Putus Sekolah di Kota Medan mengalami penurunan, data ini didapat dari data pokok Pendidikan dari tahun 2005 s/d 2012.

Penelitian ke empat berbedayaitu dari segi judul, lokasi penelitian di Kota Ambon, Provinsi Maluku. dengan fokus penelitian Pemerintah Kota Ambon secara jelas berusaha untuk mengoptimalkan dan meminimalisasi serta menekan angka anak putus Sekolah di Kota Ambon,

Penelitian kelima berbeda dengan penelitian ini yaitu dari segi judul lokasi penelitian, lokasi penelitian ini di Kabupaten Wejo. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan pemerintahan daerah dalam menekan angka anak putus Sekolah di Kabupaten Wajo.

b. persamaan

dari kelima penelitian tersebut adanya persamaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian pertama dengan dengan penelitian ini memiliki persamaan dari segi metode penelitian yang digunakan kualitatif menggunakan konsep peran, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dinas pendidikan bisa mengatasi anak putus sekolah sehingga tidak banyak lagi anak-anak yang putus sekolah.

Pada penelitian kedua memiliki persamaan dengan penelitian ini dari segi metode penelitian yang digunakan kualitatif secara deskriptif dan menggunakan konsep peran guna mewujudkan anak-anak tidak putus sekolah di kota pekanbaru.

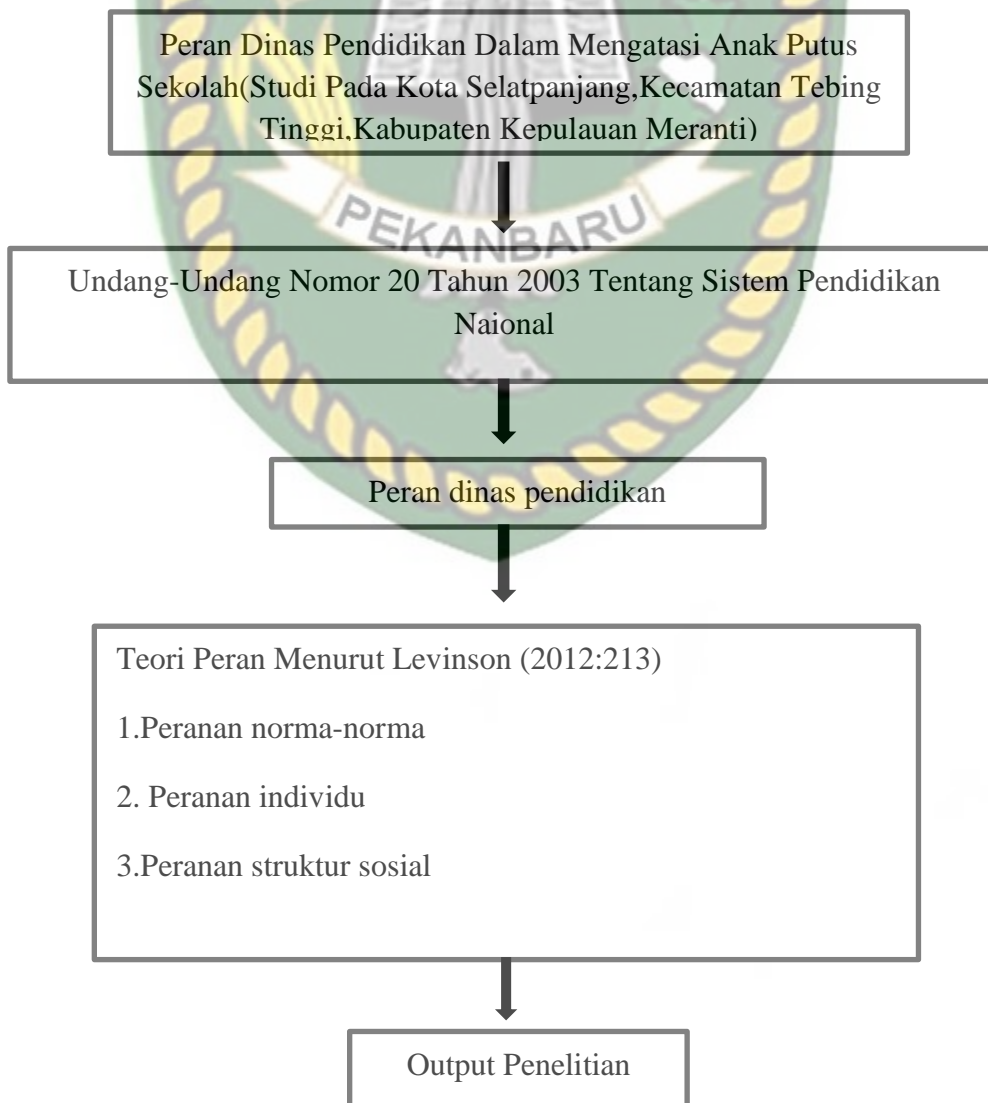
Pada penelitian ketiga ini memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan kualitatif dan menggunakan konsep peran, untuk mewujudkan berkurangnya anak putus sekolah di kota medan.

Pada penelitian keempat ini memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan kualitatif guna menjadikan kota ambon berkurangnya anak putus sekolah.

Pada penelitian kelima ini memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan kualitatif guna mewujudkan kota Wajo peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo

C.Kerangka Pikiran

Gambar II,1, Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Studi Pada Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti)





Terlaksananya Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti

D.Konsep Operasional

Dalam penelitian ini konsep operasioanal bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu di jelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

- a. Peran adalah (rule), yaitu aspek dinamis kedudukan (ststus) apabila seseorang melaksanakannya hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranan .
- b. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang dimana telah di sepakati dengan pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh memiliki wewenang untuk dijadikan pedoman.
- c. Implemenasi kebijakan merupakan salah satu pengetahuan keputusan tentang hal yang mendasar tertuang dalam Undang-Undang, namun juga berbentuk instruksi-instruksi penting dari eksekutif atau keputusan perundangan.
- d. Pendidikan merupakan suatu pembelajaran dan pondasi utama untuk membangun peradaban bangsa.

- e. Peranan Norma-norma adalah peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat(Norma)
- f. Peranan individu adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi (individu)
- g. Peranan struktur social adalah perilaku individu yang penting bagi sruktur social masyarakat (struktur social)

E. Operasional Variabel

Tabel II.2:Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variable	Indicator	Sub Indikator
--------	----------	-----------	---------------

<p>Peranan(role)merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.Soerjono Soekanto(Levinson, 2012;213)</p>	<p>Peranan dinas pendidikan</p>	<p>1.Peranan norma-norma</p> <p>2.Peranan individu</p> <p>3.Peranan struktur social</p>	<p>a.Memberikan sosialisasi terkait anak putus sekolah</p> <p>b.Memberikan dampak-dampak yang terjadi bila putus sekolah.</p> <p>a.Pengarahan kepada siswa/siswi agar tidak terjadinya putus sekolah.</p> <p>b.Memberitahukan bahaya-bahaya apa yang akan terjadi jika putus sekolah.</p> <p>a.Membuat program-program pendidikan untuk mengatasi anak putus sekolah</p> <p>b.meningkatkanya pencapaian target penyelesaian masalah anak putus sekolah</p>
---	---------------------------------	---	--

Sumber : Data Olahan Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A, Tipe Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diambil dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang mendeskripsikan hasil penelitian sebagai landasan dalam fokus penelitian sesuai fakta dilapangan mengenai Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Studi Pada Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Selatpanjang tepatnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Selatpanjang. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan masih ada angka anak putus sekolah tingkatan SD dan SMP yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Informan Dan Key Informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi dalam memperoleh data yang di butuhkan . pemilihan informan ini melalui pertimbangan bawa orang yang dipilih dapat memberikan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang sudah diteliti.

Dengan ini penulis menemukan informan penelitian dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yang terbagi menjadi 2 (dua) orang sebagai informan formal dan 4 (empat) orang sebagai informan informal.

Key informan atau informan kunci adalah informan yang memiliki dan mengetahui berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam Penelitian ini yang menjadi Tokoh formal yang menjadi subjek atau informan adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabid Pembinaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti dan tokoh informal yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu 2 (dua) orang tua anak putus sekolah perwakilan dari Kecamatan Tebing Tinggi.

Tabel III.1 Informan dan Key Informan

No.	Informan	Nama	Jumlah
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti	ROSITA,S.STP,MM	Key Informan
2.	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Kabupaten Kepulauan Meranti	IRA SELDA FITRA S.IP,MPA	Informan
3	Kepala sekolah SDN 21 Kecamatan Tebing Tinggi Timur	SYUKUR.S.S.Pd	Informan
4.	Kepala Sekolah SMPN 3 Selatpanjang	JAENAB,S.SPd	Informan
5	Orang Tua Anak Putus Sekolah	1,Arbiyah,2.Parni, 3.Aluh	Informan
6	Siswa Putus Sekolah	1.Turgi,2.Ristia,3.Ari Putra	informan
	Jumlah		10

D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan teknik purposive sampling yakni penentuan informan tidak didasarkan pedoman dan pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan dengan cara menentukan informan kunci yang kemudian akan dilanjutkan oleh informan berikutnya yang dengan tujuan untuk mencari serta mengembangkan informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap.

E. Jenis Dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data primer

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dilapangan dari pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel, yang didapatkan langsung dari sampel atau responden penelitian melalui wawancara, dan observasi.

2. Data sekunder

Yaitu data dari pihak yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menjadi objek penelitian ini meliputi :

- a. Keadaan geografis lokasi penelitian
- b. Struktur organisasi dinas pendidikan
- c. Peraturan perundang-undangan
- d. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh yang diperlukan, maka penulis disini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data antara lain :

1. Wawancara Kualitatif

Wawancara yang dimaksud Creswell(2014:254) yaitu peneliti melakukann face-to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, wawancara merekan dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok).

2. Observasi Kualitatif

Observasi adalah ketika penulis langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian.(Creswell,2014:254).

Observasi bisa dikatakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap fenomena objek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data.

3. Dokumentasi Kualitatif

Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (Koran, makalah, laporan, kantor) atau pun dokumen privat (buku harian, diari, surat e-mail). (Creswell, 2014; 255)

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit; melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri dari orang lain.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel dibawah akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai pada awal bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.2 : Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah(Studi Pada Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke 2021-2022															
		Nov				Des				Jan				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan Penyusunan Up	x	x	X	X												
2.	Seminar Up							x									
3.	Revisi Up										X						
4.	penelitian Lapangan													x			
5.	Pengelolaan dan analisa data														x		
6.	Bimbingan skripsi																X
7.	Ujian Skripsi																
8.	Revisi Skripsi																
9.	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Selatpanjang

Kota Selatpanjang merupakan salah satu pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, dahulu kota selatpanjang merupakan salah satu Bandar(kota) yang paling sibuk dan terkenal perniagaan di dalam Kesultanan Siak. Bandar ini sejak dahulu telah terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa, di karenakan peran antar merekalah terbentuk erat dalam keharmonisan kegiatan kultural maupun perdagangan.

Semua itu tidak terlepas dari ke toleransian antar persaudaraan, faktor inilah yang kemudian menyebarkan perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari China kenusantara dan sebaliknya. Daerah Selatpanjang dan sekitarnya dahulunya merupakan wilayah kekuasaan dari Kesultanan Siak Sri Indrapura yang merupakan salah satu Kesultanan terbesar di Riau saat ini.

Pada masa pemerintahannya Sultan Siak VII yaitu Sultan Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baawali (yang bertahta tahun 1784-1810) biasa disapa Sultan Syarif Ali, memberi titah kepada Panglima Besar Muda Tengku Bagus Saiyid Thoha untuk mendirikan Negeri atau Bandar di Pulau Tebing Tinggi.

Kala itu, sebelah timur negeri berbatasan dengan Sungai Suir dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Perumbi. Seiring perkembangan waktu Bandar ini semakin ramai dan bertumbuh sebagai salah satu Bandar perniagaan di Kesultanan Siak. Ramainya interaksi perdagangan di daerah pesisir Riau, menyebabkan pemerintahan Hindia Belanda ikut ambil dalam bagian penentuan nama negeri ini. Sejarah tercatat, pada masa Sultan Siak yang ke-11 yaitu Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin, pada tahun 1880, pemerintahan di Negeri Makmur Kencana Tebing Tinggi dikuasai oleh JM Tengko Soelong Tjantik Sijet Alwi yang berelar Tuan Temenggung Marhum Buntut (Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak)

Pada masa pemerintahannya di Bandar ini terjadilah polemik dengan pihak Pemerintahan Kolonial Belanda yaitu Konteliur Van Huis mengenai perubahan nama negeri ini, dalam sepihak pemerintahan kolonial Belanda mengubah daerah ini menjadi Selatpanjang, namun tidak disetujui oleh JM Tengko Soelong Tjantik Sijet Alwi selaku pemangku daerah. Akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal 4 September 1899, Negeri

Makmur Kencana Tebinggi berubah menjadi Negeri Mkamur Bnadar Tebingtinggi Selatpanjang.

JM Tengkoë Soelong Tjantik Saijet Alwi mangkat ada tahun 1908. Seiring waktu, masa diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kota Selatpanjang dan sekitarnya ini Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Tebingtinggi. Pada tanggal 19 Desember 2008, daerah Selatpanjang dan sekitarnya ini berubah menjadi Kabupaten Bengkalis dengan Ibu Kota Selatpanjang.

Taman Cik Puan dan Kolam Telaga Bening di tengah Kota Selatpanjang, punya nilai sejarah. Di taman Cik Puan ini banyak peristiwa terjadi dan bernilai sejarah. Sejak dari yang sederhana seperti tempat menampilkan pentas seni sampai peristiwa politik yang heroic juga selalu berlangsung disini.

Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti lepas dari induk Kabupaten Bengkalis beberapa agenda yang melibatkan massa yang besar berlangsung di arena ini, Taman Cik Puan menjadi saksi sejarah. Di samping itu, Kolam Cik Puan Park adalah penopang air untuk masyarakat Selatpanjang. Jika musim kemarau iba kola mini menjad tumpuan untuk mendapatkan air buat mandi dan cuci bahka untuk mnum . harapan ke depan, objek wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti terus diperhatikan, dan masyarakat bias menjaga dan melestarikan dengan baik.

Kabupaten Kepulauan Meranti Merupakan Kabupaten terbaru di Provinsi Riau yang beribukota di Selatpanjang, terletak antara $01^{\circ}39'33''$ - $01^{\circ}25'08''$ LintangUtara $102^{\circ}10'29''$ - $103^{\circ}16'43''$ Bujur Timur. Daerah ini mempunyai warna tersendiri yang mencakup berbagai aspek atau struktur kebumiannya. Luas wilayah Kabupaten Meranti adalah $3.707,84 \text{ Km}^2$ (370.784 Ha) yang sebagian besar merupakan daerah daratan rendah. Berdasarkan luas wilayah yang dimiliki tersebut, Kabupaten Kepulauan Meranti yang tergolong daerah beriklim tropis basah dengan intensitas curah hujan yang tinggi.

Salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah kecamatan Tebing Tinggi. Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi memiliki luas Wilayah $1.438,83 \text{ km}^2$ dan memiliki beberapa beberapa kelurahan di antaranya yaitu Kelurahan Selatpanjang Kota.

Kecamatan Tebing Tinggi ini memiliki sebanyak Sembilan desa/kelurahan, yaitu ada 5 desa dan 4 kelurahan. Desa yang sangat luas di antara desa yang lain adalah desa banglas dengan luas mencapai $35,56 \text{ km}^2$ atau 44% dari luasnya Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kelurahan yang paling kecil terdapat pada desa/kelurahan Selatpanjang Barat yaitu 1 km^2 atau 1% dari Kecamatan Tebing Tinggi. Dan diukur dari skala geografisnya semua desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi berpotografi datar. Dan berdasarkan letak geografisnya sendiri hampir semua desa berada di pesisir/tepi pantai. Kecuali Kelurahan Selatpanjang

Timur, Selatpanjang Selatan dan Desa Alah Air Timur, ketiga Kelurahan ini berada pada wilayah daratan.

2. Keadaan Penduduk Kota Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi

Kota selatpanjang Merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Indonesia. Kecamatan Tebing Tinggi adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dengan jumlah 56.192 jiwa, dan Kecamatan Tebing Tinggi ini adalah salah satu yang memiliki perkembangan jumlah penduduk yang tinggi di dibandingkan dengan Kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021

No .	Desa / Kelurahan	Jumlah Pendudukan		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sesap	269	248	108
2.	Banglas Barat	1.830	1.733	106
3.	Banglas	2.718	2.456	111
4.	Selatpanjang Timur	7.426	7.339	101
5.	Selatpanjang Selatan	4.274	4.185	102
6.	Alah Air	2.453	2.433	101
7.	Alah Air Timur	1.485	1.423	104
8.	Selatpanjang Barat	2.663	2.580	103
9.	Selatpanjang Kota	5.540	5.137	108
Jumlah		28.658	27.544	104

Sumber : BPS Kab. Kep. Meranti 2021

Dapat di lihat dari tabel jumlah penduduk diatas dapat di paparkan bahwa Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk laki-laki terbanyak di dapat pada

Kelurahan Selatpanjang Timur dengan jumlah 7.426 jiwa dan di susul dengan Kelurahan Selatpanjang Kota dengan jumlah 5.540 jiwa, selanjutnya, kemudian Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk perempuan terbanyak yaitu Kelurahan Selatpanjang Timur 7.339 jiwa dan disusul dengan Kelurahan Selatpanjang Kota yaitu dengan Jumlah 5.137 jiwa.

3. Pemerintahan Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti

Kota Selatpanjang yang dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil bupati . penyelenggaraan Pemerintahan Kota Selatpanjang di pusatkan pada Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti. Kota Selatpanjang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Bupati adalah kepala daerah yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan beberapa tindakan-tindakan secara langsung yang ada di daerah. Bupati adalah lembaga esekutif, yaitu adalah lembaga yang menjadi pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang telah di buat oleh legislative. Oleh karena itu erkait dengan fungsi peraturan yang ada, fungsi ini mengatur tentang hubungan manusia dengan masyarakat. Pemerintah merupakan pihak yang bias menerapkan dan melaksanakan peraturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dinamis.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 9(Sembilan kecamatan) dan memiliki 5(lima) dan memiliki 96(Sembilan puluh enam desa) yaitu Kecamatan Tebing Tinggi memilki 4(empat) Kelurahan dan memiliki 5(lima) desa yaitu Kelurahan Selatpanjang Barat, Kelurahan Selatpanjang Kota , Kelurahan

Selatpanjang Selatan, Kelurahan Selatpanjang Timur, Desa Alah Air,Desa Alah Air Timur,Desa Banglas,Desa Banglas Barat. Kecamatan Tebing Tinggi Barat yang memiliki 14(empat belas) Desa yaitu Desa Alai,Desa Alai Selatan,Desa Batang Malas,Desa Gogok Darusalam,Desa Insit,Desa Kundur,Desa Maini Darul Anam,Desa Mantiasa,Desa Mekong,Desa Mengkikip, Desa Tanjung, Desa Tanjung Darul Takzim,Desa Peranap,Desa Tenan. Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang memiliki 10(sepuluh) Desa yaitu Desa Batin Suir,Desa Kepau Baru,Desa Lukun,Desa Nipah Sendanu,Desa Sendanu Darul Ihsan,Desa Sungai Tohor,Desa Sungai Tohor Barat, Desa Tanjung Gadai,Desa Tanjung Sari,Desa Teluk Buntal. Kecamatan Merbau yang memiliki 1(satu) Kelurahan dan 9(Sembilan desa) kelurahan Bagan Melibur,Desa Lukit,Desa Mayang Sari,Desa Mekar Sari,Desa Meranti Bunting,Desa Pelantai,Desa Sungai Anak Kamal,Sungai Tengah,Sungai Tanjung Kulim,Desa Teluk Belitung. Kecamatan Pulau Merbau Memiliki 11(sebelas) Desa yaitu Desa Baran Melintang,Desa Batang Meranti,Desa Centai,Desa Ketapang Permai,Desa Kuala Merbau,Desa Padang Kamal,Desa Pangkalan Balai,Desa Renak Dungun,Desa Semukut,Desa Bunga,Desa Teluk Ketapang. Kecamatan Rangsang memiliki 14(empat belas) Desa yaitu Desa Citra Damai,Desa Dwi Tunggal,Desa Gemala Sari,Desa Penyagun,Desa Repan,Desa Sei Gayung Kiri,Desa Tanjung Bakau,Desa Tanjung Gemuk,Desa Tanjung Medang,Desa Tanjung Samak,Desa Tebun,Desa Teluk Samak,Desa Topang,Desa Wonosari. Kecamatan Rangsang Barat memiliki 12(dua belas) Desa yaitu Desa Anak Setatah,Desa Bantar,Desa Bina Maju,Desa Bokor,Desa Lemang,Desa Mekar Baru,Desa Melai,Desa Permai,Desa

Segomeng,Desa Sialang Paung,Desa Sungai Cina,Desa Telaga Baru. Kecamatan Rangsang Pesisir memiliki 11(sebelas) Desa yaitu Desa Beting,Desa Bungur,Desa Kayu Ara,Desa Kedabu Rapat,Desa Sendaur,Desa Sokop,Desa Sonde,Desa Tnah Merah,Desa Tanjung Kedabu,Desa Telesung,Desa Tenggayun Raya. Kecamatan Tasik Putri Puyu memiliki 10(sepuluh) Desa yaitu Desa Bandul,Desa Dedap,Desa Kudap,Desa Mekar Delima,Desa Mengkirau,Desa Mengkopot,Desa Putri Puyu,Desa Selat Akar,Desa Tanjung Padang,Desa Tanjung Pisang. Untuk lebih jelasnya bias di lihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

No.	Nama Kecamatan	Kelurahan	Desa
1.	Tebing Tinggi	1.Slp.Barat 2.Slp.Kota 3.Slp.Selatan 4.Slp.Timur	1.Alah Air 2.Alah Air Timut 3.Banglas 4.Banglas BARAT 5.Sesap
2.	Tebing Tinggi Barat		1.Alai 2.Alai Selatan 3.Batang Malas 4.Gogok Darussalam 5.Insit 6.Kundur 7.Maini Darul Anam 8.Mantisa

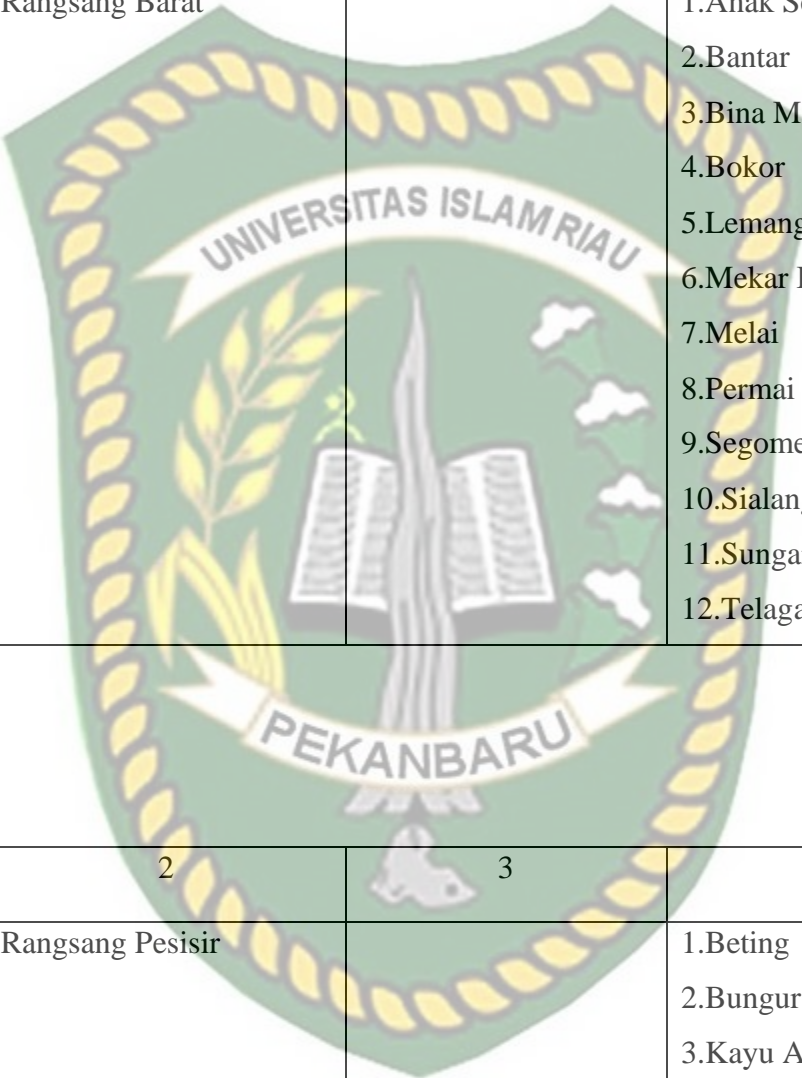
			9.Mekong 10.Mengkikip 11.Tanjung 12.Tanjung Darul Takzim 13.Tanjung Pranap 14.Tenan
--	--	--	--



1	2	3	4
3.	Tebing Tinggi Timur		1.Batin Suir 2.Kepau Brau 3.Lukun 4.Nipah Sendanu 5.Sendanu Darul Ihsan 6.Sungai Tohor
4.	Merbau	1.Bagan Melibur	1.Lukit 2.Mayang Sari 3.Mekar Sari 4.Meranti Bunting 5.Pelantai 6.Sungai Anak Kamal

			7.Sungai Tengah 8.Tanjung Kulim 10.Teluk Belitung
5.	Pulau Merbau		1.Baran Melintang 2.Batang Meranti 3.Centai 4.Ketapang Permai 5.Kuala Merbau 6.Padang Kamal 7.Pangkalan Balai 8.Renak Dungun 9.Semukut 10Tanjung Bunga 11.Teluk Ketapang

1	2	3	4
6.	Rangsang		1.Citra Damai 2.Dwi Tunggal 3.Gemala Sari 4.Penyagun 5.Repan 6.Sei.Gayung Kiri 7.Tg.Bakau 8.Tg.Gemuk 9.Tg.Medang 10.Tg.Samak 11.Tebun

			12.Teluk Samak 13.Topang 14.Wonosari
7.	Rangsang Barat		1.Anak Setatah 2.Bantar 3.Bina Maju 4.Bokor 5.Lemang 6.Mekar Baru 7.Melai 8.Permai 9.Segomeng 10.Sialang Pasung 11.Sungai Cina 12.Telaga Baru
1	2	3	4
8.	Rangsang Pesisir		1.Beting 2.Bungur 3.Kayu Ara 4.Kedabu Barat 5.Sendaur 6.Sokop 7.Sonde 8.Tanah Merah 9.Tg.Kedabu 10.Telesung

			11.Tenggayun Raya
9.	Tasik Putri Puyu		1.Bandul 2.Dedap 3.Kudap 4.Mekar Delima 5.Mrngkirau 6.Mengkopot 7.Putri Puyu 8.Selat Akar 9.Tanjung Padang 10.Tanjung Pisang

B.Dinas Pendidikan Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti,

Dinas pendidikan merupakan salah satu unsur yang melakukan urusan Pemerintahan dibidang pendidikan, dan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk organisasi lembaga ini dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan adanya keputusan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 telah ditetapkan bebrapa peraturan tugas pokok dan fungsi Dinas Penddikan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti.

Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan memiliki tugas untuk melakukan wewenang yang berkaitan dengan pendidkan. Dan instiusi Dinas Pendidikan ini terdiri dari beberapa bagian yaitu Tata Usaha,Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Bidang endidikan Sekolah Menengah

Pertama, Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga dan Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu.

1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti,

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti pasti saja tidak luput untuk mewujudkan, melaksanakan, meningkatkan, dan menumbuhkan pendidikan semakin baik, karena pendidikan sangat penting bagi masyarakat terutama untuk anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar, karena wajib belajar adalah 9 tahun melalui jalur formal dan nonformal.

Dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti menjadikan pendidikan semakin bermutu untuk semua jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan oleh karena itu Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016-2020 adalah : Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas, insan yang cerdas, kompetitif, bermoral dan berbudaya melayu.

Sedangkan untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016-2021 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

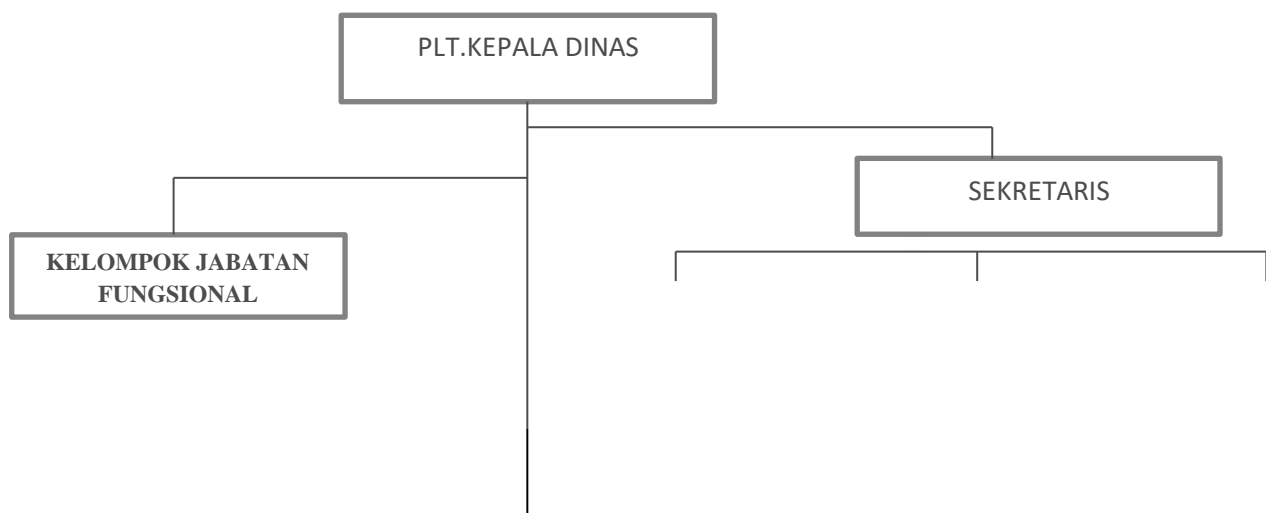
- 1) Mewujudkan pelayanan PAUD dan DIKMAS (Pendidikan Masyarakat) yang bermutu, dan merata.

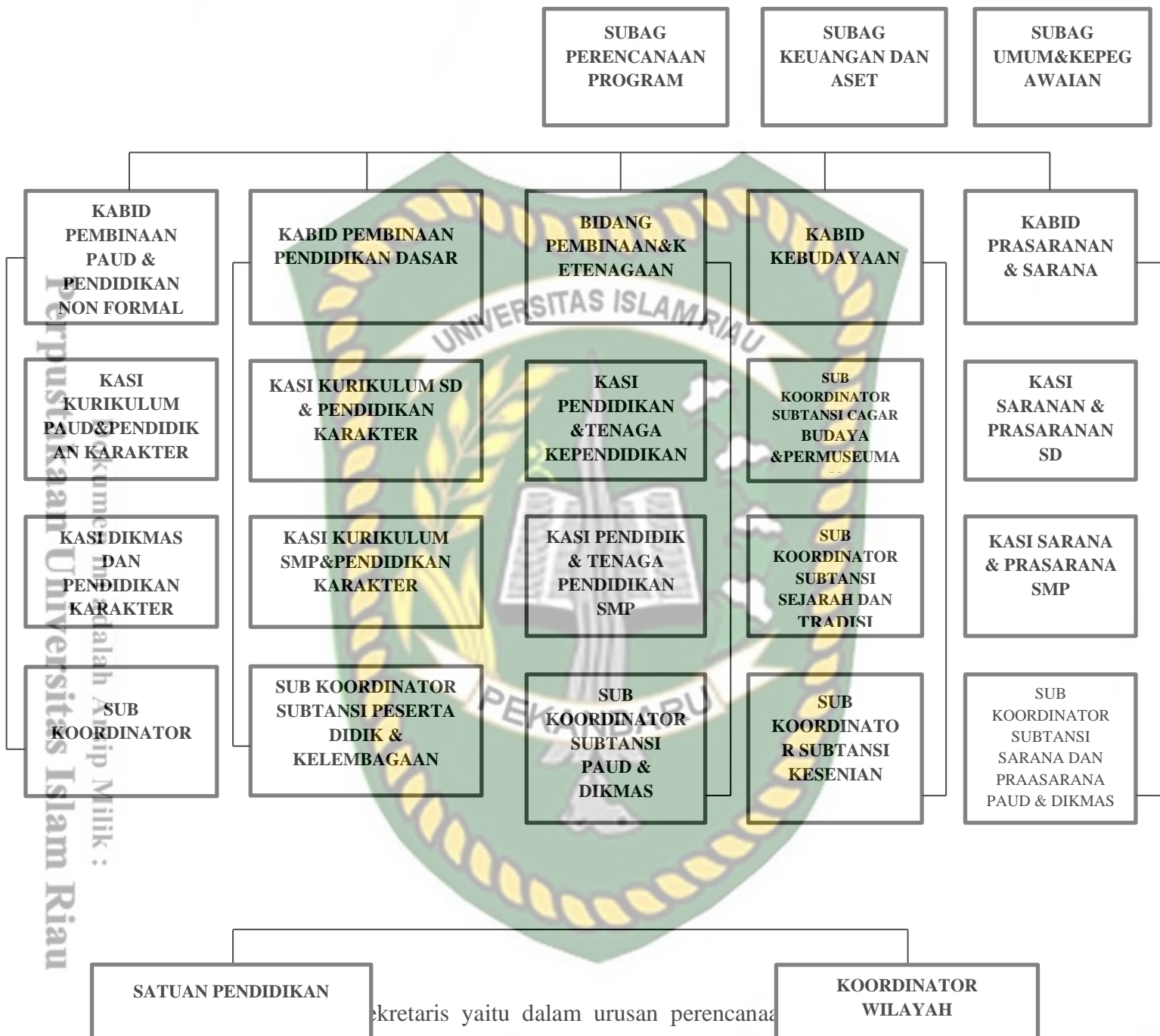
- 2) Melaksanakan percepatanwajib belajar 9 tahun melalui jalur formal dan nonformal.
- 3) Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- 4) Meningkatkan pelayanan pendidikan secara merata.
- 5) Menumbuh kembangkan kearifan lokal dan budaya dalam pendidikan guna terciptanya masyarakat yang madani.

2.Tugas Pokok Dinas Pendidikan adalah menjalankan berbagai urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas disbanding pendidikan dan kebudayaan
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas pendidikan dan kebudayaan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan
- e. Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang pendidikan dan kebudayaan.

3.Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti





dan sebagai pelaksanaan program kerja kesetariannya berdasarkan pada ketentuan peratua perundang-undangan yang berlaku,selain menjalankan tuganya sebagai sekretaris juga mempunyai bebrapa fungsi yaitu sebagai penyusunan,dan koordinasi susunan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan serta

program-program pendidikan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah di tetapkan.

Sekretaris terbagi atas tiga sub bagian,yaitu sub bagian perencanaan program,sub bagian keuangan dan aset,dan sub bagian umum dan kepegawaian. Sub bagian perencanaan program memiliki tugas menyiapkan bahan-bahan bimbngan,kebijakan pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Sub bagian perencanaan program sebagaimana yan di maksud:

- a. Merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai naham untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan denan tugas sub bagian perencanaan program.
- c. Mencari,mengumpulkan,menghimpun,mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian perencanaan program sebagai kerangka acuan?pedoman penyusunan program dan anggaran kegiatan
- d. Menginvertarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas susb bagian perencanaan programserta menyiapkan bahan-bahandaam rangka pemecahan masalah.

- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman, dan petunjuk teknis dibidang perencanaan program.
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang dan organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
- g. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan rencana kerja tahunan/RKT Dinas, arah kebijakan umum (AKU) rencana kerja organisasi perangkat daerah (RENJA SKPD) dan laporan pertanggung jawaban (LPJ), serta laporan kinerja instansi pemerintah (LaKIP).
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran.
- i. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara aparatur dan public untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan.
- j. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA.
- k. Menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan tahunan berupa petunjuk operasional, petunjuk pejabat pelaksanaan teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (perubahan) DPA.
- l. Mengupayakan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBDP) guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya.
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

- n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan program sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi astasan,dan.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada secretariat.

Sub bagian keuangan dan aset memiliki tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan,kebijakan,pedoman,dan petunjuk teknis serta layanan di bidang keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Sub bagian keuangan dan aset sebagaimana yang di maksud:

- a. Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan dan aset berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuanagan dan aset.
- c. Mencari,mengumpulkan,menghimpun,mensistematisasikan dan mengelola data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan aset sebagai kerangka acuan?pedoman menyusun rencana kegiatan.

- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan aset serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
- e. Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang.
- f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang.
- g. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset.
- h. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat kartu inventaris barang (KIB) dan membuat kartu inventaris ruangan (KIR)
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.
- j. Penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan

- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan aset sebagai bahan penanggung jawaban.
- m. Melaksanakan tugas laian yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada secretariat.

Sub bagian umum dan Kepegawaina mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan,kebijakaan,pedoman,dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana yang di maksud:

- a. Merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk meaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di terapkan.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaian.
- c. Mencari,mengumpulkan,menghimpun,mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum kepegawaian sebagai kerangka acua/pedoman penyusunan rencana kegiatan.
- d. Menginvertarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecagan masalah.

- e. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya.
- f. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup satuan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai-pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas.
- g. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan dinas.
- h. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan proses administrasi perjalanan dinas kepegawaian sesuai petunjuk atasan.
- i. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas.
- j. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat.
- k. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan dan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada sekretariat.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam suatu penelitian terdapat pertanyaan dari pembacanya mengenai identitas informan itu sangat wajar terjadi. Maka pada dasarnya dalam suatu penelitian itu sangat penting dijelaskan mengenai identitas informan,informan dalam peneliti ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lengkap dan jelas. Informan tersebut terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan,Kabid Dinas Pendidikan Kota Selatpanjang,Kepala Sekolah SD 21 sesap,dkepala Sekolah SMP 2 Selatpanjang,Orang Tua Siswa.

Dalam penelitian tentang Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah,Pada Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten,Kepulauan Meranti ini sebagai penulis ingin menjelaskan mengenai identitas informan yang teliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin informan dapat dilihat pada tabel keterangan dibawah ini yaitu :

Tabel V.1; Identitas Informan Penelitian Tentang Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah(Studi Pada Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti)

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	ROSITA,S.STP, MM	Kepala Dinas Pendidikan,Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti	Key Informan
2.	IRA SELDA FITRI S.IP, MPA	Kabid Dinas Pendidikan,Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti	Informan
3.	SYUKUR.S.Pd.SD	Kepala sekolah SD 21 Sesap,Kecamatan Tebing Tinggi.	Informan
4.	JAENAB,S.Pd	Guru Sekolah SMP 3 Selatpanjang	Informan
5.	ARBAIYAH	Orang Tua Siswa	informan
6.	ALUH	Orang Tua Siswa	Informan
7.	PARNI	Orang Tua Siswa	Informan
8.	RISTI	Anak Putus Sekolah	Informan
9.	ARI PUTRA	Anak Putus Sekolah	Informan
10.	TURGI	Anak Putus Sekolah	Informan

Sumber:Dta Olahan Peneliti 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang menulis digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 7 orang yang terdiri dari beberapa satu key informan yaitu Kepala Dinas Pendidikan,Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti.,dan lima orang informan lainnya, yaitu Kabid Dinas Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti.Kepala Sekolah SD 21 Sesap Kecamatan Tebing Tinggi,Guru SMP 3 Selatpanjang,Orang tua putus sekolah,Anak putus sekolah

I.I.I Usia Informan

Usia adalah salah satu factor yang menentukan mengenai bagaimana kejelasan pengumpulan suatu informasi peneliti yang sesuai dengan kondisi peneliti. Kemudian usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan memudahkan tingkat analisis dan pemahaman informasi terhadap pertanyaan wawancara yang akan di ajukan oleh peneliti guna untuk memperoleh data dan informasi yang peneliti butuhkan.

Kematangan seseorang dalam berfikir juga bias dipengaruhi dengan usia. Berhubungan dengan kematangan berfikir dengan usia seseorang juga berpengaruh dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu dalam tabel ini akan digambarkan usia informan,yaitu sebagai berikut:

Tabel.V.II:Identitas Informan Berdasarkan Kriteria Usia

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
----	--------------	--------	------------

1.	8-20	3	-
2.	21-25	-	-
1	2	3	4
3.	26-30	-	-
4.	31-35	2	%
5.	36-40	1	%
6.	41-45	2	%
7.	46-50	2	%
Jumlah		10	100%

Sumber :Data Olahan Penelitian 2022

Berdasarkan dari tabel diatas bias kita lihat bahwa usia key Informan dan informan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabid Pendidikan Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kepala Sekolah SD 21 Sesap Kecamatan Tebing Tinggi. Guru SMP 2 Selatpanjang. Orang Tua Siswa Putus Sekolah. Terdapat 3 orang kriteria 8-20 , Terdapat 2 orang kriteria usia 31-35 tahun dengan presentase 25%, 1 orang kriteria usia 36-40 tahun dengan presentase 25%, 2 orang kriteria usia 41-45 tahun dengan presentase 25% dan 3 orang kriteria usia 46-50 tahun dengan presentase 25%.

1.1.2. Jenis Kelamin

Dalam suatu penelitian, jenis kelamin juga merupakan hal yang tidak berpengaruh terhadap hasil dari suatu penelitian yang dilakukan selama informan tersebut dapat memberikan suatu informasi yang sesuai dan yang benar dengan apadanya sesuai dengan kondisi penelitian yang apa adanya. Jenis kelamin juga

tidak dapat dijadikan patokan dalam menentukan pemahaman dan pola pikir terhadap suatu masalah penelitian. Berikut akan dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel V.III : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	3	40%
2.	Perempuan	6	60%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui jenis kelamin informan pada penelitian ini terdapat 3 jenis kelamin yaitu 3 laki-laki dengan presentase 30% dan 6 perempuan dengan presentase 70% jadi kesimpulan dari tabel diatas diketahui bahwa penilaian informan yang berjenis kelamin laki-laki memiliki presentase yang lebih rendah dari pada informan berjenis kelamin perempuan. Dalam hal ini semua informan memilii kedalaman informasi yang berbeda tetapi jenis kelamin tidak menentukan bagaimana pemahaman dan pola pikir terkait tentang Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah(Studi Pada Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti).

1.1.3 Tingkat Pendidikan

Dalam suatu penelitian dengan pertanyaan wawancara yang diajukan dengan jawaban yang diberikan oleh informan merupakan data yang harus di analisis. Hal ini tentu memiliki jawaban yang berbeda dan tidak sama persis antara

informan satu dengan jawaban informan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut di pengaruhi selain pada tingkat pemahaman informan yang diangkat dalam penelitian, tetapi juga bias di pengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang pernah di lalui oleh informan.

Berdasarkan dengan penelitian ini yang penulis lakukan dilihat dari tingkat pendidikan informan dalam penelitian Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Studi Pada Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti) sebagai berikut :

Tabel V.4 : Identitas Informan berdasrkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Sekolah Dasar (SD)	3	25%
2.	Sekolah Menengah Pertama(SMP)	-	-
3.	Sekolah Menengah Atas(SMA)	3	25%
4.	Diploma III (D3)	-	-
5.	Strata 1 (S1)	2	25%
6.	Magister (S2)	3	25%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan Key Informan dan Informan yang terdiri dari 3 orang tingkat Pendidikan Dasar (SD) dengan presentase 25% , 3 orang tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan presentase 25% , 2 orang tingkat Pendidikan Sastra 1 (S1) dengan presentase 25%, 3 orang tingkat Pendidikan Magister (S2) dengan presentase 25%.

B.Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah(Studi Pada Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti)

Dalam mengatasi anak putus sekolah tentunya Dinas Pendidikan juga sangat berperan penting dalam mengatasi anak putus sekolah tersebut yang berguna untuk membina anak tersebut untuk tidak putus sekolah dan tetap melanjutkan pendidikannya. Mengatasi anak putus sekolah semata-mata guna untuk menertibkan dan membina memberi pengarahan,pengetahuan untuk anak yang putus sekolah agar anak tersebut tetap melanjutkan pendidikannya dan memiliki arah dalam kehidupannya.

Mengatasi anak putus sekolah itu sendiri adalah upaya untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan dan supaya menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan. Karena pada dasarnya anak putus sekolah adalah anak yang tidak melanjutnya pendidikan,anak putus sekolah juga sebagai suatu proses berhentinya siswa dan siswi itu secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Anak-anak yang putus sekolah di Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,terdiri dari jenjang SD dan SMP. Kepala Dinas Pendidikan memberikan pernyataan ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah yaitu faktor ekonomi,lingkungan,dan keluarga.

1.Peranan Norma-Norma

Peranan meliputi norma-norma menurut Soejono Soekanto(2012:213) merupakan yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam

masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma secara social di kenal ada empat meliputi :

- a. Cara(*Usage*): lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat,akan tetapi hanya sekedar celaan dari induvidu yang dihubunginya.
- b. Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
- c. Tata Kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas,secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
- d. Adat Istiadat (*custom*) , merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan meningkatnya menjadi *custom* atau adat istiadat. Soejono Soekanto(2012:174)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti pada Kamis,10 Maret 2022 pukul 16.00 WIB dengan Ibuk Ira SeldaFitri S.IP, MPA selaku Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai anak putus sekolah memberikan pendapat sebagai berikut :

“jadi sebenarnya , anak putus sekolah adalah permasalahan pendidikan yang merupakan kondisi anak yang tidak berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan sehingga tidak memperoleh ijazah,yang di sebabkan oleh faktor-faktor tertentu,terkait dengan anak putus sekolah jadi itu adalah masalah pendidikan,masalah putus sekolah itu bukan hanya tanggung jawab dari guru saja,sekolah saja, atau dinas pendidikan saja,tetapi juga tanggung jawab beberapa komponen seperti msayarakat,orang tua, jadi yang kita harapkan dari dinas pendidikan tu bagaimana anak-anak itu bisa melanjutkan sekolah minimal 9 tahun. dari sd 6 tahun dan smp 3 tahun,tetapi dari kondisi yang kita jumpai di lapangan masih terdapat anak putus sekolah,dan anak putus sekolah yang kita jumpai terdapat beberapa faktor yaitu keluarga,ekonomi,lingkungan,dan masalah pemahaman orang tua anak ni akan tetap bersekolah atau anak ini berhenti bersekolah,jadi dengan anak putus sekolah ini sudah jelas bahwa tidak akan mendapatkan tanda tamat belajar dan akan berdampak pada masa depannya (10 maret 2022)”

Selanjutnya faktor tentang anak putus sekolah yang masih dijelaskan terlebih oleh Ibuk Ira Selda Fitri S.IP, MPA yaitu sebagai berikut :

“faktor anak putus sekolah juga di setujui dengan faktor ekonomi dan lingkungan,faktor ekonomi yang lemah dari orang tua akan memaksa orang tua nya bekerja keras bahwa mungkin harus terpisahdari keluarga sehingga menjadi kurang perhatian kepada anak,dengan keterbatasan ekonomi,mengjadikan kebutuhan-kebutuhan untuk biaya pendidikan anak tersebut tidak terpenuhi berdampak anak tak bersekolah dan membantu orang tua. Lingkungan juga bisa mempengaruhi bagi anak yang berada dalam lingkungan teman,keluarga,masyarakat yang kurang memperhatikan atau rendah pendidikan dan lingkungan yang kurang baik akan berdampak padaanak tersebut yang kemudian ikut dengan pola kehidupan lingkungan (10 maret 2022)”

Sedangkan untuk sosialisai terkait anak putus sekolah dijelaskan terlebih oleh ibuk ROSITA,S.STP, MM Kepala Dinas Kabupaten Kepulauan Meranti pukul 16.10 yaitu sebagai berikut :

“kalau dari dinas pendidikan itu kita emang kalau langsung ke siswa nya atau orang tuanya itu tidak,istilah tidak ada kusus dikarenakan dari jumlah siswa yang banyak,orang tua yang banyak tidak memungkinkan ,tapi terkadang dari sekolah-sekolah melakukan sosialisasi kepada siswa-siswinya bahwa pendidikan itu

penting,dan melakukan rapat pertemuan orang tua guna melakukan sosialisai bahwa pendidikan itu penting,dan mewaspadai agar tidak terjadinya anak putus sekolah.(10 maret 2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara pada kamis 10 maret 2022 pukul 16.20 WIB di ruangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ibuk ROSITA,S,STP, MM mengenai dampak yang ditimbulkan dari anak putus sekolah dan apakah melanggar norma-norma yang berlaku:

“putus sekolah akan berdampak pada masalah social,Karna akan terjadinya pengangguran,kejahatan,kriminalitas,kemiskiban,kenakalan remaja,yang hal ini akan menjadi penghambatan bagi kemajuan bangsa(10 maret 2022)”

“anak putus sekolah itu berkaitan dengan masalah pendidikan dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku.norma-norma yang berlaku . norma adalah kebiasaan yang menjadi pedoman prilaku bagi wilayah masyarakat tertentu.jadi putus sekolah dan norma dua hal berbeda(10 maret 2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak SYUKUR,S.Pd.SD Kepala Sekolah SD 21 Sesap pukul 09.46 WIB hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 mengenai anak putus sekolah:

“penyebab utama anak putus sekolah adalah kurang sadar tentang pendidikan,orang tua kurang memperhatikan anak jam 06.00 orang tua sudah pergi bekerja anak dibiarkan mau sekolah atau enggak,kebanyakan anak yang putus sekolah dikarenakan anak tersebut dibawa orang tua nya untuk ikut bekerja seperti menual sagu,diajak mencari ikan,diajak ketempat kerja arang(16Maret2022)”

Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dengan orang yang sama serta waktu tempat yang sama beliau mengatakan sikap anak dan nilai nya bahwa:

“Sikap anak tersebut bersosialisai nya bagus,jiwa sosialisasinya itu bagus,sama teman baik,kadang juga nakal tapi nakalnya itu ya nakal sewajarnya anak pada umumnya lah,kalau untuk nilai ya tergantung dengan anaknya,ini dikasi tugas

jarang dikerjakan, jarang masuk, jadi dikasi bawah standar karena dia jarang masuk sekolah(16Maret2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada ibuk JAENAB,S.Pd Guru Sekolah SMP 3 Selatpanjang.pada hari kamis 17 maret 2022 pukul 9.30 mengenai anak putus sekolah :

“penyebab utama anak putus sekolah adalah malasnya minat belajar disekolah yang membuat siswa tersebut bermalas-malasan untuk belajar,dan faktor lingkungan dan teman,melihat teman tidak bersekolah siswa tersebut juga ikut-ikutan tidak mau bersekolah,dan memilih bekerja katanya untuk membantu orang tua,tatapi ada yang saya tau orang tua siswa tersebut kalau dibilang orang tidak mampu tidak juga,tapi dia memilih untuk tidak melanjutkan sekolah lagi,ya ada juga salah satu siswa disini tidak melanjutkan sekolah dikarenakan membantu orang tua nya bekerja,dikarenakan orang tua nya tidak mampu(17 maret 2022)”

Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dengan orang yang sama serta waktu tempat yang sama beliau mengatakan sikap anak dan nilai nya bahwa:

“sikap anak tersebut di sekolah ada yang pendiam dan ada yang nakal,kalau dengan teman ya meraka suka bercanda gitu,salah satu siswa yang putus sekolah ada yang sering cabut dari sekolah,dan ketahuan merokok di sekolah,pernah di razia ketahuan membawa hp,sikapnya terhadap guru kurang mengenakan,dan nilai anak tersebut ya udah pasti dibawah setandar karna itu tadi kurangnya minat belajar yang membuat siswa tersebut bermalas-malasan (17 maret 2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada orang tua siswa yang bernama ibuk Arbaiyah pada hari rabu tanggal 16 Maret 2020 jam 14.00 WIB.dirumah ibuk Arbiayah.mengenai alasan utama anak tersebut tidak melanjutkan sekolah.

“karena ristia kadang-kadang saya ajak ketempat kerja untuk membantu kami di ladang,kadang-kadang ikut bapaknya mencari ikan,siput di pinggir laut untuk di jual,dan hasilnya untuk keperluan kami,tapi saya tidak memaksa ristia untuk tidak sekolah (16maret2022)”

“dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kami juga mengalami kesulitan,penghasilan sehari dari hasil jual ikan,siput kadang-kadang tidak menentu kalau banyak dapatnya hasilnya bisa sampai 60 ribu(16 maret 2021)”

Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dengan orang yang sama serta waktu tempat yang sama,peneliti menanyakan apakah ada guru atau dinas yang meakukan sosialisasi tau kunjungan.

“kalau dari SD 21 itu kepala sekolahnya sendiri yang datang kerumah untuk menjemput anak sekolah,dan menasehati kami sebagai orang tua tentang pentingnya pendidikan anak minimal 9 tahun wajib belajar (16 maret 2022).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ibuk parni selaku orang tua dari salah satu anak putus sekolah,pada hari minggu (20 maret 2022) pukul 10.00 WIB ,mengenai anak putu sekolah.

“turgi putus sekolah dikarenakan faktor terpengaruhnya dengan teman-teman yang sudah tidak melanjutkan sekolah dan dia ikut tidak bersekolah,dulu pas masih sekolah dia sering tidak masuk,saya sering mendapat surat panggilan dari rumah sekolah (20 maret 2022)”

Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dengan orang yang sama serta waktu tempat yang sama.

“aktifitas anak tesebut sekarang bekerja arang,kerjanya tu membakar arang,muat arang(20 maret 2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada anak anak yang putus sekolah yang bernama risti anak SD 21 Sesap pada hari rabu tanggal 16 maret 2022 jam 15.00 WIB, dirumah anak tersebut,mengenai putus sekolah

“ikut mamak kerja cari ikan sama siput di pinggir-pinggir bakau,jadi gak sekolah lagi,karna jarang masuk sekolah dah malas pergi kesekolah lagi (16maret2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan orang yang sama dan tempat di waktu yang sama mengenai pembelajaran anak di sekolah sebagai berikut:

“kalau belajar kadang susah, karena banyak ketinggalan pelajaran, jadi gak paham (16 maret 2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada anak yang putus sekolah yang bernama Ari putra anak SD 21 Sesap pada hari Selasa tanggal 22 maret 2022. Jam 16.00 WIB di rumah anak tersebut, mengenai anak putus sekolah.

“ikut mamak kerja di kebun, kadang ikut bapak cari ikan di laut, mau pergi ke sekolah udah siang jadi malas lagi mau pergi ke sekolah lagi (22 maret 2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan orang yang sama dan tempat di waktu yang sama mengenai pembelajaran anak di sekolah sebagai berikut:

“iya, kalau menerima pelajaran dari ibu, gutu suka kesulitan, kadang ngantuk kalau di kelas (22 maret 2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada anak yang putus sekolah yang bernama Turgi anak SMPN 3 Selatpanjang pada hari Minggu tanggal (20 maret 2022) pukul 10:30 WIB di rumah anak tersebut, mengenai putus sekolah.

“malas ke sekolah, malas mau belajar, kadang dah pergi ke sekolah tapi gak sampai, jadi dari pada bohong sama orang tua bagus aku bilang mau berhenti sekolah aja (20 maret 2022)”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan orang yang sama dan tempat di waktu yang sama mengenai pembelajaran anak di sekolah sebagai berikut:

“kadang paham, kadang enggak, kalau dalam menerima pembelajaran berlangsung tidak terlalu sulit (20 maret 2022)”

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan key informan dan informan mengenai Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah(Studi Pada Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti)belum cukup dikatakan terlaksana. Karena masih ada beberapa anak putus sekolah yang terjadi di kecamatan tebing tinggi,khususnya di daerah sesap.

Dari hasil observasi ke lapangan pada hari kamis,tanggal 10 maret 2022, pukul 16.23 WIB, maka dapat disimpulkan bahwa dalam peranan norma-norma dalam mengatasi anak putus sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti belum melakukan sosialisasi dengan baik karena Dinas Pendidikan,disini dilihat dari temuan di lapangan bahwa Dinas pendidikan tidak memberikan surat edaran kepada seklah mengenai sosialisasi tentang pendidikan, hanya memberikan surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa dan anak-anak yang bersekolah akan pentingnya pendidikan minimal 9 tahun,dan dari hasil observasi dilapangan bahwa anak putus sekolah tersebut terjadi akibat perekonomian keluarga dan faktor lingkungan yang mempengaruhi anak tersebut tidak bersekolah lagi.

2.Peranan Individu

Menurut levinson dalam soekanto (2009 : 213) Teori Peranan individu adalah peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan individu dalam Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah(Studi Pada Kota

Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti) berkaitan dengan pengarahan kepada siswa/siswi agar tidak terjadinya putus sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada hari kamis (10 maret 2022) pukul 16.30 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti Ibuk Ira SeldaFitri S.IP, MPA selaku Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

“kalau untuk memberikan pengarahan terhadap siswa/siswi maupun orang tua kami tidak ada mendatangangi langsung,kami dari disdik memberikan surat kepada sekolah-sekolah guna melakukan pengarahan terhadap anak-anak sekolah supaya tidak putus sekolah,upaya disdik untuk mengatasi angka putus sekolah dengan maksimal kan program Indonesia pintar yang menjadi program pemeintah pusat,dalam bentukbantuan dana pendidikan bagi siswa miskin atau rentan miskin (10 maret 2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara pada kamis 10 maret 2022 pukul 17.00 WIB di ruangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ibuk ROSITA,S,STP, MM mengenai pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dari anak putus sekolah.

“pengaruhnya ya bisa mempengaruhi untuk masa depan anak terebut seperti bisa menjadi pengangguran,sekarang banyak kita lihat anak yang tidak melanjtkan sekolah bisa menjadi criminal,karna gak ada kerjaan unjung-ujungnya mencuri,dan masih banya pengaruh anak putus sekolah,sangat disayangkan sekali kalau anak tersebut putus sekolah (10 maret 2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada kepada Bapak SYUKUR,S.Pd.SD Kepala Sekolah SD 21 Sesap pukul 10.00 WIB hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 mengenai pengarahan-pengarahan kepada siwa-siswi agar tidak terjadinya putus sekolah.

“kalau di sini setiap upacara di hari senin pasti di berikan masukan-masukan atau pengarahan kepada murid-murid bahwa sekolah itu penting,agar tidak terjadi putus sekolah(16 maret 2022)”

Sedangkan untuk bahaya-bahaya apa yang akan terjadi jika putus sekolahtelebih di jelaskan oleh bapak SYUKUR.S.Pd.SD sebagai berikut:

“bahaya-bahaya yang terjadi kalau anak putus sekolah yaa bisa dipastikan sangat berdampak pada masa depan diaa,banyak terjadi pengangguran,kalau pun kerja ya paling kerjanya cuma kerja kasar,kalau jadi pengangguran bisa jadi dia menjadi pencuri,karena gak ada kerjaan (16 maret 2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada ibuk JAENAB,S.Pd Guru Sekolah SMP 3 Selatpanjang.pada hari kamis 17 maret 2022 pukul 10.00 menegai pengarahan-pengarahan:

“kalau pengarahan kadang kami dari pihak sekolah memberi sosialisasi di ruangan di jam tertentu,untuk memberi wejangan tentang pentingnya pendidikan,kalau pengarahan terhadap siswa nya langsung tidak ada,terkadang setiap upacara juga di singgung tentang pengarahan-pengarahan tentang bahayanya kalau anak tersebut putus sekolah (17 maret 2022)”

Sedangkan unuk bahaya-bahaya apa yang terjadi jika putus sekolah terlebih dijelaskan oleh ibuk JAENAP,S.Pd.sebagai berikut :

“nah,itu tadi di barengi dengan sosialisasi yang kami lakukan di sekolah ini tentang penting nya pendidikan,dan juga maengasi masukan tentang pendidikan,dan memberi tahu bahaya-bahaya apa saja jika ada anak putus sekola,guna sosialisasi ini kan untuk mencegah anak-anak tersebut tidak putus sekolah (17 maret 2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada orang tua siswa yang bernama ibuk Arbaiyah pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 jam 14.30 WIB.dirumah ibuk Arbiayah.mengenai pengarahan-pengarahan agar tidak terjadinya putus sekolah:

“pengarahan saya sebagai orang tua pasti ingin yang terbaik buat anak saya ya,tapi bagaimana lagi risti nya sudah gak mau melanjutkan sekolah,lebih memilih membantu kami bekerja,tatapi kami tidak ada memaksa anak tersebut tidak bersekolah (16 maret 2022)”

Sedangkan untuk tanggapan ibuk ketika mengetahui anak putus sekolah dan bagaimana bahaya-bahaya jika putus sekolah yang akan dijelaskan oleh ibuk arbaiyah sebagai berikut:

“saya tidak begitu terkejut,karena memang anak ini kan selalu ikut saya dan bapak nya untuk membantu bekerja,kalau bahay-bahaya yang akan terjadi di masa depan anak,kami sebagai orang tua pasti bakalan menasehati anak tersebut (16 maret 2022)”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ibuk parni selaku orang tua dari salah satu anak putus sekolah,pada hari minggu (20 maret 2022) pukul 10.20 WIB.

“kalau mengasi pengarahan kepada anak saya sih berkali-kali jangan sampai putus sekolah,tapi emang anak nya yang mau,kami sebagai orang tua sudah melakukan semaksimal mungkin,menasehati sudah,tapi omongan saya ni kek angina mungkin,ya itu sudah pilihan dia jadi yaudah lah (20 maret 2022) ”

Sedangkan untuk tanggapan ketika mengetahui anak putus sekolah dan memberitahukan bahaya-bahaya yang terjadi jika anak putus sekolah dijelaskan oleh ibuk parni sebaai berikut:

“pertama kali saya tau anak gak mau sekolah lagi,saya kepikiran,terus saya dapat surat panggilan dari sekolah karna anak gak pernah masuk,tapi saya gak pergi kesekolah,saya malu kan,jadi ya sudahlah,di nasehati sudah tapi eman anaknya udah gak mau sekolah mau diapakan lagi (20 maret 2022)”

“itulah yang saya takutkan bahaya-bahaya yang bisa di timbulkan,saya takut anak saya mencoba mabuk-mabuk salah pergaulan,tapi muda-mudahan saja tidak,kalau dibilang memberi tau tentang bahaya-bahaya nya ya udah bosen nak, tapi anak saya berhenti sekolah mau bekerja gitu,jadi gak jadi pengangguran ”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ibu Aluh selaku orang tua dari salah satu anak putus sekolah, pada hari Kamis (24 Maret 2022) pukul 10.00 WIB.

“saya kadang bilang sama anak saya Ari sekolah lah lagi nak, tetapi karna anak ni sudah terbiasa membantu kami di ladang, kadang ikut bapaknya cari siput, dia jadi malas lagi mau ke sekolah (24 maret 2022)”

Sedangkan Sedangkan untuk tanggapan ketika mengetahui anak putus sekolah dan memberitahukan bahaya-bahaya yang terjadi jika anak putus sekolah dijelaskan oleh ibu pami sebagai berikut:

“ya gak gimana-gimana ya, karna kan ari membantu kami bekerja, pagi sudah ikut bapaknya mencari siput di bakauan, kalau disayangkan anak tidak melanjutkan sekolah ya sangat di sayangkan sekali tapi bagaimana lagi anak nya juga tidak mau bersekolah lagi, bahaya-bahayanya untuk masa depan anak ya kami sebagai orang tua pasti memberi arahan mana yang baik mana yang tidak (24 maret 2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada anak-anak yang putus sekolah yang bernama Risti anak SDN 21 Sesap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 jam 15.20 WIB, tentang pengarahannya dan bahaya jika terjadinya putus sekolah di rumah anak tersebut,

“kalau dari guru gak ada ngasi pengarahannya langsung, tapi kemarin pernah di jemput bapak kepala sekolah buat sekolah lagi, kalau mamak sama bapak Cuma bilang gak mau sekolah lagi, tu Risti bilang gak mau, malu mau masuk sekolah lagi (16 maret 2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada anak-anak yang putus sekolah yang bernama Ari putra anak SDN 21 Sesap pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022. Jam 16.10 WIB. tentang pengarahannya dan bahaya jika terjadinya putus sekolah di rumah anak tersebut,

“kalau dari sekolah gak ada ngasi pengarahan sama bahaya-bahaya yang akan terjadi,Cuma kadang kalau upacara ngasi ceramah kek gitu,ari pernah di jemput bapak kepala sekolah buat sekolah lagi,tapi ari gak mau (22maret2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada anak yang putus sekolah yang bernama Turgi anak SMPN 3 Selatpanjang pada hari Minggu tanggal (20 maret 2022) pukul 10:35 WIB . tentang pengarahan dan bahaya jika terjadinya putus sekolah.dirumah anak tersebut,

“kalau mamak sering bilangin suruh sekolah lagi,katanya mau jadi apa kau kalau gak sekolah,kalau dari sekolah gak ada ngasi tau langsung,cuma di kasi surat panggilan buat orang tua (20maret2022)”.

Berdassrkandari hasil observasi peneliti lakukan pada hari Kamis,tanggal 10 maret 2022,pukul 16.25 WIB Jadi dapat di simpulkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Key informan dan informan Dinas Pendidikan Kabupaen Kepulauan Meranti mengenai indicator Peranan Individu dalam Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah(Studi Pada Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti) Dinas Pendidikan sudah memberikaan surat edaran prihal penyaluran dana PIP , untuk siswa-siswi yang kurang mampu,agar bisa terus bersekolah,untuk membantu kebutuhan sekolahnya,agar tidak terjadi putus sekolah.

C.Struktur Sosial

Menurut Soejono Soekanto(2012:213) struktur sosial adalah hubungan timbal balik antar posisi-posisi social dan peranan-peranan social yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok dalam sruktur tersebut. Peranan juga dapat dikatakan sebagai rilaku individu yang penting bagi struktur social

masyarakat social masyarakat. Struktur sosial dalam Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah(Studi Pada Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti) berkaitan dengan program-program-pendidikan untuk mengatasi anak putus sekolah.

Prilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan,pengorganisasian,pengarahan,pemotivasian dan pengendalian untuk mengembalikan keputusan tentang kecocokan anar individu,tugas pekerjaan dan efektivita. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh prilaku individu ;

Aada 4ciri utama individu,yaitu:

1. Presepsi (perception) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.
2. Sikap (attitude) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang,obyek,dan situasi yang berhubungan dengannya.
3. Kepribadaian adalah serangkaian ciri yang relative mantap,kecendrungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor social,kebudyaan dan lingkungan.
4. Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relative tetap dalam prilaku sebagai akibat dari praktek.(siswanto,2012:76)

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu komplek penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertent berdasarkan atas kedudukan social tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti pada Kamis,10 Maret 2022 pukul 16.40 WIB dengan Ibuk Ira SeldaFitri S.IP, MPA selaku Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai program kerja untuk mengatasi anak putus sekolah anak putus sekolah memberikan pendapat sebagai berikut :

“dalam mengatasi masalah anak putus sekolah disdik melakukannya untuk semua kecamatan yang ada di kabupaten kepulauan meranti upayanya dengan memberikan edaran agar tidak ada pungutan dari sekolah kepada siswa, penyedian sapras,adanya pendidikan kesetaraan(program paket A,B,C) memaksimalkan pengelolaan dana BOS (10 maret 2022)”

Selanjutnya penjelasan masih dengan orang yang sama dan waktu tempat yang sama mengenai meningkatnya pencapaian target penyelesaian masalah anak putus sekolah yang di jelaskan oleh ibuk Ira SeldaFitri S.IP, MPA selaku Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti:

“kalau pencapaian target penyelesaian masalah anak putus sekolah ya sudah jelas sudah di lakukan semaksimal mungkin,ya kami berharapnya anak-anak yang bersekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti ini tidak ada lagi yang namanya putus sekolah (10 maret 2022)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada kepada Bapak SYUKUR,S.Pd.SD Kepala Sekolah SD 21 Sesap pukul 11.00 WIB hari Rabu tanggal 16 Maret 2022

“di sekolah SD 21 ini tidak ada yang namanya pungutan biaya sekolah,karena sudah mendapat surat edaran dari dinas pendidikan agar tidak ada pungutan biaya dari sekolah,dan semua fasilitas sekolah suda di danai dengan dana BOS (16 maret 2022)”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada ibuk JAENAB,S.Pd Guru Sekolah SMP 3 Selatpanjang.pada hari kamis 17 maret 2022 pukul 10.40 :

“kalau untuk pungutan biaya sekolah seperti spp di sekolah smp 3 gak ada,karena fasilitas sekolah seperti bangku,meja itu sudah di biyai menggunakan dana BOS,kalau bayaran Cuma uang baju pas awal masuk seekolah (17 maret 2022)”

Jadi dapat disimpulkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan mengenai struktur social dalam Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah sudah terlaksana. Hal ini bisa dilihat dari progam kerja dinas pendidikan yang memberi surat edaran kepada sekolah-sekolah agar tidak melakukan pungutan biaya,dan dinas pendidikan memberlakukan program sekolah paket a,b,c untuk anak yang putus sekolah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti kamis 10 maret 2022 pukul 14.40 WIB mengenai indikator Stuktur Sosial dalam Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah(Studi Pada Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti) bahwa Dinas sudah melakukan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pencapaian target penyelesaian masalah anak putus sekolah,dan disdik juga melakukan program kerja seperti membri surat edaran kepada sekolah-sekolah SMP dan SD agar tidak memungut biaya terhadap siswa-siswa nya.

C. Hambatan dalam Pearan Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah(Studi Pada Kota Selatpanjang,Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan mengatasi anak putus sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah : Hambatan bagi dinas ini sendiri adalah dinas sudah berupaya memberikan surat edaran berupa bantuan PIP untuk siswa-siswi yang kurang mampu, tetapi masih saja ada anak yang putus sekolah dikarenakan faktor keluarga dan ekonomi,Hambatan faktor social yang dimaksud disini adalah latar belakang orang tua nya yang hanya tamatan sekolah dasar atau tidak tamat sekolah dasar sekali pun dan oleh karena itu orang tua kurang menghargai tentang pentingnya pendidikan. Mereka menyekolahkan anak hanya semata-mata bisa untuk membaca dan menulis saja,karena orang tua anak tersebut beranggapan sekolahnya seseorang kepada jenjang yang lebih tinggi hanya untuk membuang biaya, mereka beranggapan terhadap anak lebih baik membantu orang tuanya bekerja, seharusnya walaupun orang tuanya ada yang tidak tamat sekolah dasar atau hanya sampai sekolah dasar, anaknya bisa menjadi seorang sarjana tetapi ini sangat jarang sekali terjadi. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya,diketahui bahwa faktor struktur social menjadi salah satu penyebab anak putus sekolah .karena beranggapan bahwa pendidikan itu tidak tertalu penting untuk masa depan anak,dan lebih memilih membantu bekerja.mereka beranggapan untuk sekolah tinggi-tinggi sangat membutuhkan

biaya yang besar, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih kekurangan. Padahal dari Dinas Pendidikan sudah memberikan bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sekolah tingkat sekolah dasar tidak dipungut biaya sepeserpun.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penelitian mengenai Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Studi

Pada Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti) maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Norma-Norma

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil peranan norma-norma dari segi Dinas Pendidikan Kota Selatpanjang sudah berupaya melakukan yang terbaik seperti sudah memberikan surat edaran kesekolah-mengenai bantuan PIP untuk siswa-siswi yang kurang mampu, guna untuk membantu siswa-siswi tersebut agar tidak putus sekolah. Tetapi masih saja ada anak yang tidak ingin melanjutkan sekolah dengan alasan faktor ekonomi. karena sebagian pekerjaan orang tua adalah nelayan dan buruh ladang. Oleh karena itu anak kadang dibawa oleh orang tua untuk membantu pekerjaan orang tua.

2. Peranan Individu

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil peranan individu yang di dapat dari lapangan bahwa Dinas Pendidikan sudah berupaya membantu dengan adanya bantuan seperti PIP, akan tetapi rendahnya minat belajar siswa dikarena keterbatasan kemampuan orang tua dalam memberikan kebutuhan finansialnya. sehingga mengharuskan anak tersebut membantu orang tuanya bekerja.

3. Struktur Sosial

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Struktur Sosial adalah dari kalangan Lingkungan dapat disimpulkan bahwa lingkungan juga mempengaruhi terjadinya anak putus sekolah, lingkungan pergaulan anak

ini sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap anak, karena bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak, lingkungan masyarakat juga sangat turut mempengaruhi terhadap perkembangan dan pertumbuhan setiap anak yang berdampak pada pendidikan anak. Namun lingkungan masyarakat di kelurahan sesap kurang mendukung karena disini terdapat anak putus sekolah lantaran terpengaruh terhadap teman-temannya yang sudah tidak sekolah. karena sudah berani merokok, menjadi anak tersebut malas bersekolah.

Kurangnya motivasi dan dukungan dari keluarga : keluarga adalah peran utama dalam kegiatan belajar anak. karena peran orang tua adalah membimbing, memberikan perhatian dan kondisi perekonomian orang tua menjadi berpengaruh keberhasilan pendidikan anak. tetapi kurangnya bimbingan dan perhatian orang tua kepada anak dapat membuat anak berdampak pada kurangnya minat belajar anak tersebut. Dan tingkat kesadaran tentang pendidikan anak pun kurang.

6.2. Hambatan

Hambatan dalam peran dinas pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah adalah Dinas Pendidikan sudah berupaya membantu siswa-siswi tersebut dengan memberikan bantuan berupa PIP, akan tetapi masih ada anak yang tidak ingin bersekolah lagi, dan lemahnya pengetahuan orang tua mengenai pendidikan

membuat orang tua acuh tak acuh dengan pendidikan anak, dan orang tua selalu membawa anak tersebut untuk ikut membantu orang tuanya bekerja.. dari Dinas Pendidikan tidak bisa berbuat banyak karena dari segi bantuan untuk siswa-siswi yang kurang mampu sudah diberikan.

6.3.Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti agar lebih memperhatikan dan memberikan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah, siswa-siswi, dan orang tua siswa mengenai dampak yang terjadi jika anak di usia dini putus sekolah, karena sangat berpengaruh ke masa depan anak tersebut. Pentingnya melakukan sosialisasi ialah jangan sampai terjadi anak-anak putus sekolah karena pendidikan itu sangat penting, agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah.
2. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti agar membuat program kerja seperti program sekolah paket a, b, c untuk anak tersebut bisa melanjutkan sekolah.
3. Kepada orang tua yang harus lebih giat mencari nafkah keluarga agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan supaya anak tidak ikut terbebani dengan ikut orang tua bekerja, dan anak akan lebih berfokus ke pendidikannya.

4. Kepada masyarakat agar lebih mengawasi pergaulan anak-anak dan lebih memberi nasehat atau menegur anak-anak jika merokok dan menongkrong hampir larut malam, agar menghindari terjadinya anak putus sekolah. Kepada anak-anak yang putus sekolah agar tetap semangat terus dalam berusaha belajar, selalu membangun motivasi kepada sendiri, dan tidak mudah putus harapan sehingga mampu menyelesaikan jejang pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Rivai, Veithzal (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori kePraktik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Abdi: Supriyanto dkk. 2009 _ *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah*. UII

El Muhtaj: Majid W 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* Jakarta: Grafindo Pers

Hasballah: Fachruddin_ 2006. *Pertumbuhan dan Perkembangan* Banda Aceh: Yayasan PeNA

Mutiara Farah. 2014. *Faktor Penyebab Putus sekolah Dan Dampak Negatifnya Bagi Anak*

Budiarjo, Miriam. 2009 . *Dasar-Dasar Ilmu Politik* . Edisi Revisi. Cetakan Kesembilan. Jakarta

Effendi, Bachtiaq. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta.

Musfiqon. 2007. *Menangani yang Putus Sekolah*. [http://www.surya.co.id/web/Opini / Menangani - yang-Putus-Sekolah.html](http://www.surya.co.id/web/Opini/Menangani_yang_Putus_Sekolah.html). (diakses tanggal 15 Oktober 2015)

Iskandar, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial : Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta : Penerbit GP Pres.

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Nidraha, Taliziduhu 2011. *kybernology jilid 1 dan 2 (ilmu pemerintahan baru)*, Jakarta cipta

Nurcholis, Hanif. 2007. *Pemerintahan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Saydam, Gouzali, 2000. *Manajeen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Djembatan

Sukirno sadono.2013. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta:PT Raja Grafindo apaersada.

Suhardono.,Eko.2016. *Teori Peran,Konsep,dan Derivasi dan Implikasinya*. Jakaeta:Gramedia

j.Moleong, Lexy.2013. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

JURNAL DAN SKRIPSI

Ricardo Sapu`tra Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Putus Sekolah Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2012-3015

Yuni talakua (peran Stakeholder Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon

Dockery: Donna J_ 2012. "Masa1ah Putus Sekolah (Dropout). Indikator, Tren, dan Interoensi Bagi konselor Sekolah%: Journal ofSchool Counseling, Volume 10,Number12Apri2012 (Online):(http://muktizasikimblogspot.com.2012/04/masa1ah-putus-sek01ahdropout-ind1kator.html: diakses 06 Februari 2014 pukul 17.26 WIB)_

Nevy Farista Aristin. 2015. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Anak Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Ahmad Fauzi R.2012. Analisis Peranan Pemeritahan Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah Di Kabupaten WWajo

Muhammad Arif. 2018. Peran Dinas Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Keca`matan Pemulatan Selatan Kabupaten Ogan Hilir

Fani Fitria. 2018. Peran Dinas Pendidikan Dalam Perumusan Pelaksanaan Pencegahan Anak Rawan Putus Sekolah Di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015`

Thoha, Miftah. 2007, Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

PERATURAN

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2006 Pada Pasal 1 ayat (1) Tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah